



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGRIBISNIS PAMAko
TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agribisnis Pamako Tahun 2026–2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGRIBISNIS PAMAko TAHUN 2026–2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Desa yang dalam peraturan ini disebut dengan Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari.
8. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Kawasan Perdesaan Agribisnis Palembayan, Matua, dan IV Koto yang selanjutnya disebut Kawasan Agribisnis Pamako adalah kawasan perdesaan yang mengutamakan sektor bisnis yang berbasis pada usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir.
10. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar nagari yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat nagari melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agribisnis Palembayan, Matua, dan IV Koto yang selanjutnya disebut RPKP Pamako, adalah rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan.

Pasal 2

- (1) Nama kawasan yang tercatat di Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal adalah Kawasan Agribisnis Pamako.
- (2) Dokumen terkait Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan nama Kawasan Agribisnis Pamako.
- (3) Usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pariwisata berperan sebagai sektor pendukung dalam Kawasan

Agribisnis Pamako.

Pasal 3

- (1) Kawasan Agribisnis Pamako dimuat dalam RPKP Pamako Tahun 2026-2029.
- (2) RPKP Pamako Tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan Kawasan Agribisnis Pamako untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) RPKP Pamako Tahun 2026-2029 memuat:
 - a. isu strategis Kawasan Agribisnis Pamako;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan Kawasan Agribisnis Pamako;
 - c. strategi dan arah kebijakan Kawasan Agribisnis Pamako;
 - d. program dan kegiatan pembangunan Kawasan Agribisnis Pamako;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.
- (2) RPKP Pamako Tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum Kawasan Agribisnis Pamako;
 - c. bab III memuat delineasi dan susunan fungsi Kawasan Agribisnis Pamako;
 - d. bab IV memuat klaster dan sasaran klaster;
 - e. bab V memuat model sinergitas pembangunan Kawasan Agribisnis Pamako;
 - f. bab VI memuat matrix program dan kegiatan; dan
 - g. bab VII memuat penutup dan lampiran.
- (3) RPKP Pamako Tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPKP Pamako Tahun 2026-2029.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan Kawasan Agribisnis Pamako yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 6

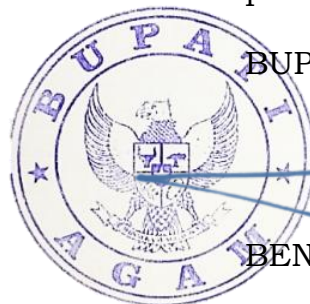
- (1) RPKP Pamako Tahun 2026-2029 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. perubahan kebijakan tentang Kawasan Perdesaan prioritas;
 - b. pergeseran signifikan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya lokal masyarakat Kawasan Perdesaan;
 - c. perubahan kondisi lingkungan dan sumberdaya Kawasan Perdesaan;
 - d. perkembangan infrastruktur dan teknologi;
 - e. perubahan batas kewilayahan; dan
 - f. hasil monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatan dalam berita daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 26 Maret 2026



BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 26 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

MHD. LUTFI AR

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2026 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN KAWASAN AGRIBISNIS
PAMAKO TAHUN 2026-2029

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGRIBISNIS PAMAKO
TAHUN 2026-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	7
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	10
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1. Latar Belakang.....	11
1.2. Kerangka Perspektif Pengembangan Kawasan Agribisnis Pamako.....	15
1.3. Maksud dan Tujuan.....	17
1.4. Landasan Hukum	18
BAB II GAMBARAN UMUM KAWASAN AGRIBISNIS PAMA KO	21
2.1. Karakteristik Fisik Dasar	21
2.2. Sosial Budaya dan Kependudukan	23
2.3. Ekonomi	26
2.4. Sarana Prasarana	29
BAB III DELINEASI DAN SUSUNAN FUNGSI KAWASAN AGRIBISNIS PAMA KO	31
3.1 Delineasi Kawasan Agribisnis Pamako	31
3.2 Susunan Fungsi Kawasan Agribisnis Pamako.....	34
BAB IV KLAS TER DAN SASARAN KLAS TER.....	36
4.1 Komoditas Unggulan Klaster Dan Sasaran Klaster.....	36
4.2 Klaster Pendukung	44
BAB V MODEL SINERGITAS PEMBANGUNAN KAWASAN AGRIBISNIS PAMA KO	46
5.1 Komoditas Unggulan Klaster Dan Sasaran Klaster.....	46
5.2 Struktur Kerja	47
BAB VI MATRIX PROGRAM DAN KEGIATAN.....	50
6.1 Fase Pra-Inkubasi.....	50
6.2 Fase Inkubasi	50
6.3 Fase Pemantapan.....	51
6.4 Fase Pengembangan	51
6.5 Kebutuhan Pengembangan Kawasan Agribisnis Pamako	53

6.6 Target pasar.....	77
6.7 Keterlibatan Stakeholder.....	77
BAB VII PENUTUP DAN LAMPIRAN.....	81
7.1 Kesimpulan.....	81
7.2 Saran.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indeks Desa Membangun di Kawasan Agribisnis Pamako.....	23
Tabel 2. Data Partisipasi Perantau dalam Pembangunan Nagari.....	25
Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kawasan Agribisnis Pamako Kabupaten Agam	25
Tabel 4. Nilai, Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kab. Agam ADHB (miliar)	26
Tabel 5. Nagari di Kawasan Agribisnis Pamako	32
Tabel 6. Produksi Tanaman Padi dan Perkebunan di Kecamatan Kawasan Agribisnis Pamako	37
Tabel 7. Data Produk Unggulan Kawasan Agribisnis Pamako	37
Tabel 8. Kawasan Agribisnis Pamako sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.....	39
Tabel 9. Bentuk Atraksi dan Event Nagari di Kawasan Agribisnis Pamako.....	41
Tabel 10. Profil Pariwisata Kawasan Agribisnis Pamako	42
Tabel 11. Jumlah Industri Kecil dan tenaga Kerja di Kawasan Agribisnis Pamako.....	43
Tabel 12. Analisis klaster Pembangunan Kawasan Perdesaan Agribisnis Pamako.....	46
Tabel 13. Struktur Kerja Pembangunan Kawasan Agribisnis Pamako	48
Tabel 14. Indikasi Program Dan Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Agribisnis Pamako Kabupaten Agam.....	53
Tabel 15. Penyertaan Modal Nagari ke BUMNagMa Pamako.....	77
Tabel 16. Penyertaan Modal Nagari ke BUMNagMa LKD	78
Tabel 17. Penyertaan Modal Nagari ke BUMNag.....	79
Tabel 18. Kelembagaan Pendukung Kawasan Kawasan Agribisnis Pamako....	80

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1. Peta Kawasan Kawasan Agribisnis Pamako 21

Grafik 1. Gini Rasio Kabupaten Agam Tahun 2019 s.d 2023 28

Grafik 2: Gini Rasio Kabupaten Kota Di Sumatera Barat Tahun 2023 28

Gambar 2. Geosite Geopark di Kawasan Perdesaan Prioritas 40

Gambar 3. Potensi Unggulan Kawasan Perdesaan 41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan kawasan perdesaan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Dengan lebih dari 70% penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perdesaan, kawasan perdesaan ini memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun permasalahan yang dihadapi oleh kawasan perdesaan, seperti kemiskinan, rendahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta terbatasnya infrastruktur, menjadi tantangan yang harus diatasi. Pemerintah dituntut menyediakan pembangunan terarah dan memfasilitasi penduduknya dengan baik. Pandangan dan upaya sistematis ini menjadi kebutuhan dan keharusan seiring dengan amanat implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan perubahan pendekatan ini, maka pembangunan di Desa tidak seharusnya hanya berfokus pada keberadaan desa tersebut sebagai wilayah tersendiri, namun demikian desa harus dibangun dalam sebuah kawasan yang satu sama lainnya sering berintegrasi dan bersinergi. Pembangunan di desa sudah semestinya didorong dalam persepektif kawasan, sehingga akselerasi pembangunan dapat cepat terwujud mengingat potensi dan permasalahan desa dapat terpetakan dan terselesaikan dalam perspektif yang lebih komprehensif.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu pendekatan pengembangan ekonomi lokal yang memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya lokal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam sebuah kawasan.

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan sendiri pada dasarnya meliputi a) pengusulan kawasan perdesaan; b) penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; c) pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan e) pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. Dalam kaitan tersebut, lingkup penyelenggaraan pembangunan kawasan

perdesaan yang sudah diawali dengan proses pengusulan dan penetapan kawasan perdesaan perlu dilengkapi dengan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam dokumen RPKP Pamako Tahun 2026-2029.

RPKP Pamako Tahun 2026-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan di dalamnya memuat program pembangunan. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan. Program pembangunan terdiri dari kegiatan prioritas tahunan, artinya kegiatan yang direncanakan menyesuaikan dengan potensi dan/atau masalah kawasan perdesaan. Program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RPKP memiliki sifat dasar yaitu: prioritas, terintegrasi, dan spesifik. Prioritas artinya program dan kegiatan yang direncanakan diutamakan sesuai tema (ciri khas) kawasan yang ditetapkan. Terintegrasi artinya program dan kegiatan yang direncanakan memadukan semua kepentingan antar desa. Spesifik artinya program dan kegiatan yang direncanakan bersifat khusus sesuai dengan tema (ciri khas) kawasan.

RPKP Pamako Tahun 2026-2029 ini disusun oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang di ketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, dan beranggotakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; Dinas Pertanian; Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Badan Keuangan dan Aset Daerah; Dinas Perhubungan; serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. TKPKP ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Agam Nomor 110 Tahun 2025 Tentang Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Periode Tahun 2025–2029.

Penyusunan RPKP Pamako Tahun 2026-2029 ini berlandaskan pada Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Membedomani Asta Cita, Kawasan Agribisnis Pamako di Kabupaten Agam mendukung Asta Cita secara keseluruhan yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Kawasan Perdesaan prioritas sangat mendukung ketercapaian keseluruhan program prioritas Asta Cita. Disamping mendukung percepatan tujuan pembangunan dari desa untuk kesejahteraan masyarakat, kawasan ini juga mendukung untuk mencapai semakin kokohnya ideologi Pancasila, nilai demokrasi dan penguatan nilai moral, sosial dan budaya serta kualitas sumber daya manusia.

Perencanaan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam RPKP Pamako Tahun 2026-2029 ini juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam 2021-2034 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2026-2029, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut, diketahui bahwa Kawasan Perdesaan prioritas ini mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut secara berkelanjutan karena memiliki aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan.

1.2. Kerangka Perspektif Pengembangan Kawasan Agribisnis Pamako

Tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan migrasi menjadi isu yang dihadapi oleh semua lapisan, termasuk perdesaan. Sebagai pusat produksi agribisnis,

Pertanian merupakan sektor utama penyokong perekonomian Daerah dengan kontribusi terbesar terhadap pendapatan domestik regional bruto dan penyerapan tenaga kerja. Ketersediaan sumber daya pertanian berupa lahan pertanian sawah sebagai sumber potensi tanaman utama dan potensi tanaman pangan lainnya, menghasilkan output komoditi yang mendukung dalam pengembangan pertanian.

Agribisnis adalah sistem rangkaian usaha-usaha (bisnis-bisnis) mulai dari usaha pengadaan sarana produksi pertanian, usaha tani, usaha pascapanen, usaha sortasi, penyimpanan dan pengemasan produk pertanian, dan berbagai usaha menghantarkan produk (berbasis) pertanian sampai ke konsumen; serta sejumlah kegiatan penunjang yang melayani sistem rangkaian usaha itu, seperti lembaga pelayanan pembiayaan, lembaga pelayanan informasi, dan lembaga pemerintah yang mengeluarkan kebijakan dan pengaturan yang terkait. Secara umum agribisnis mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan produksi, distribusi, dan pasokan input pertanian seperti bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian. Berdasarkan penjelasan tersebut, agribisnis menjadi suatu konsep yang menempatkan kegiatan pertanian sebagai suatu kegiatan yang utuh dan menyeluruh, sekaligus sebagai suatu konsep yang dapat menelaah dan menjawab berbagai masalah, tantangan, dan kendala yang dihadapi pembangunan pertanian sekaligus juga untuk menilai keberhasilan pembangunan pertanian serta pengaruhnya terhadap pembangunan nasional secara lebih tepat.

Kabupaten Agam merupakan salah satu wilayah di Sumatera Barat yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi pertanian yang besar. Secara geografis, Kabupaten Agam memiliki wilayah yang sangat beragam, dari pesisir pantai bagian barat hingga perbukitan dan dataran tinggi di bagian tengah dan timur. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Agam sebagai daerah potensial untuk pengembangan kawasan agribisnis yang berkelanjutan dan terintegrasi. Hal ini dapat dikaitkan dengan kondisi Kabupaten Agam yang memiliki potensi agribisnis yang besar, terutama di sektor pertanian,

perkebunan, dan peternakan serta letak geografis yang strategis dan kondisi agroklimat yang mendukung untuk produksi pangan. Salah satunya yaitu Kawasan Agribisnis Pamako (Palembayan, Matur, dan IV Koto) yang memiliki potensi tersebut. Di Kabupaten Agam, wilayah Palembayan, Matur, dan IV Koto dikenal sebagai kawasan yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang sangat besar, dengan sumber daya alam yang subur, topografi dataran tinggi yang mendukung, serta masyarakat yang secara historis bergantung pada sektor agraria.

Kawasan perdesaan merupakan fondasi utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan, terutama dalam konteks penguatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pemetaan ekonomi. Pembangunan kawasan perdesaan berbasis agribisnis di Palembayan, Matur, dan IV Koto diarahkan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut melalui pendekatan yang terintegrasi, partisipatif, dan berbasis potensi lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja, memperkuat kelembagaan petani, serta meningkatkan daya saing kawasan dalam skala regional maupun nasional. Ketiga kecamatan ini memiliki komoditas unggulan yang beragam, seperti kopi arabika, sayuran dataran tinggi (cabai, kol, kentang, tomat), buah-buahan tropis (durian, alpukat), serta peternakan sapi dan kambing. Sayangnya, meskipun potensinya besar, kawasan ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti produktivitas yang rendah, lemahnya akses pasar, belum tersedianya fasilitas pengolahan hasil pertanian, serta minimnya integrasi antara hulu dan hilir agribisnis.

Kawasan Agribisnis Pamako memiliki keunggulan komoditas masing-masing dan saling melengkapi namun belum terintegrasi dalam satu sistem agribisnis terpadu serta diperlukan pengembangan kawasan yang menghubungkan produksi-produksi, sayangnnya yang tinggal di Kawasan Agribisnis Pamako mayoritas adalah petani tradisional dengan pengalaman turun-temurun yang belum banyak terpapar teknologi pertanian modern serta ketersediaan tenaga kerja cukup, namun masih rendah dalam aspek manajemen agribisnis dan digitalisasi. Kawasan Agribisnis Pamako terletak di dataran tinggi Agam dengan topografi perbukitan, lembah, dan sebagian area vulkanik yang subur. Tanah vulkanik yang subur sangat cocok untuk pengembangan tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, kol. Serta kawasan

hutan dan perbukitan dapat dimanfaatkan untuk agroforestry dan tanaman tahunan yang bernilai ekonomi seperti kopi, dan kayu manis. Adapun akses jalan utama sudah menjangkau kawasan, namun masih terdapat keterbatasan infrastruktur penunjang seperti jalan usaha tani, irigasi teknis, dan fasilitas pasca-panen.

Namun demikian, hingga saat ini kawasan tersebut belum berkembang optimal sebagai kawasan agribisnis. Permasalahan yang dihadapi antara lain: rendahnya produktivitas dan nilai tambah komoditas, kurangnya teknologi budidaya dan pengolahan pasca panen, kelembagaan tani yang masih lemah serta keterbatasan akses terhadap pasar dan pembiayaan. Sebagian besar petani masih menjual hasil panen dalam bentuk mentah dan secara individu, sehingga tidak memiliki posisi tawar yang kuat di pasar. Di sisi lain, peluang pengembangan sangat terbuka lebar, baik dari segi peningkatan produksi, pengolahan berbasis usaha mikro kecil dan menengah, penguatan kelembagaan tani, hingga pemasaran berbasis digital dan kemitraan usaha. Dukungan program dari pemerintah pusat dan daerah, seperti kredit usaha rakyat, program sawah pokok murah, dan pengembangan badan usaha milik nagari, juga menjadi faktor pendorong penting. Berdasarkan kondisi tersebut, pengembangan Kawasan Agribisnis Pamako menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan lokal, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.

Untuk mencapainya, diperlukan langkah-langkah yang konkret dan sistematis di antaranya; Pemetaan potensi dan permasalahan, penguatan kelembagaan tani, peningkatan kapasitas dan inovasi teknologi, pengembangan hilirisasi dan nilai tambah produk, penguatan akses pembiayaan dan sarana produksi, Penguatan akses pasar dan promosi produk, monitoring, evaluasi, dan replikasi. Dengan demikian, pengembangan Kawasan Agribisnis Pamako merupakan kebutuhan mendesak guna mendorong transformasi ekonomi berbasis potensi lokal yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani secara menyeluruh.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RPKP Pamako Tahun 2026-2029 ini dimaksudkan sebagai :

- a. pedoman bagi semua pihak baik nagari, kabupaten, provinsi maupun lingkup pusat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di nagari yang berada dalam kawasan perdesaan yang telah dibentuk;
- b. dokumen perencanaan untuk mengakselerasi, mengarahkan, dan mengintegrasikan pelaksanaan pembangunan desa berbasis kawasan
- c. salah satu pedoman untuk melakukan pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja pembangunan kawasan perdesaan

Sementara tujuan penyusunan RPKP Pamako Tahun 2026-2029 adalah untuk mewujudkan pemanfaatan wilayah desa yang sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota, menciptakan sistem pelayanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, membangun infrastruktur ekonomi perdesaan, serta mengembangkan teknologi tepat guna. Selain itu, RPKP Pamako Tahun 2026-2029 juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa agar memiliki akses yang lebih baik terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi.

Tujuan tersebut sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, khususnya pada misi 2 transformasi sosial yang mengarahkan pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga tercantum dalam Misi Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk mencapai pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Lebih lanjut, RPKP Pamako Tahun 2026-2029 mendukung implementasi *Quick Win* poin 7, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, penyaluran bantuan langsung tunai, dan penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi masyarakat yang membutuhkan.

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2049), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 115);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 23);

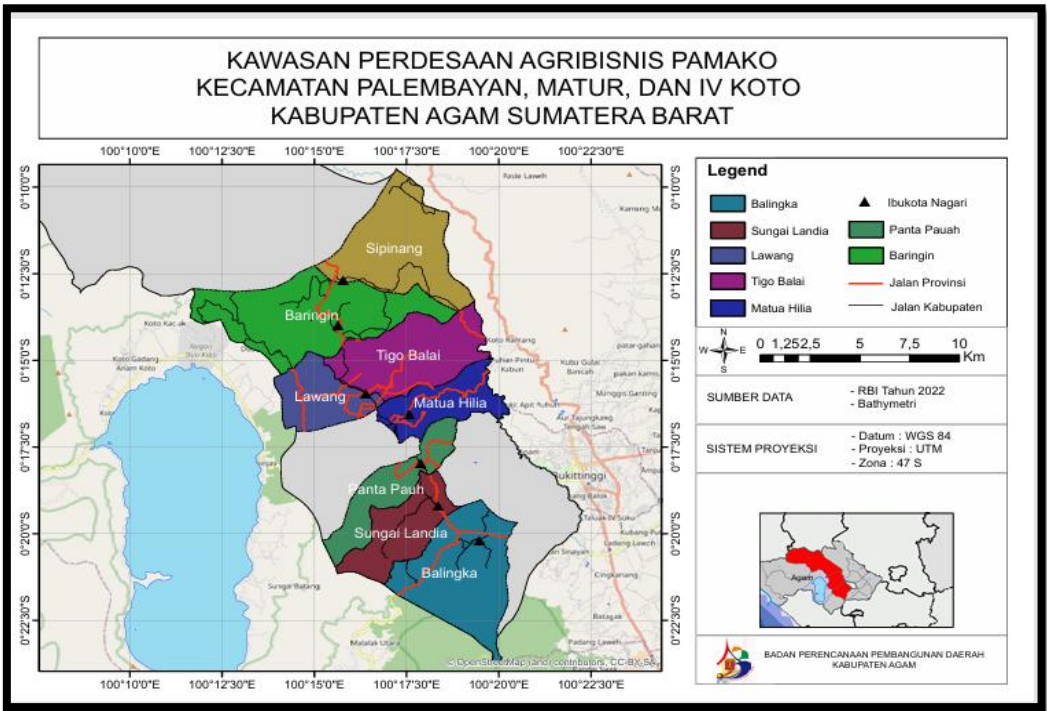
BAB II

GAMBARAN UMUM KAWASAN AGRIBISNIS PAMAko

2.1 Karakteristik Fisik Dasar

Kawasan Agribisnis Pamako Kabupaten Agam yang terdiri atas Kecamatan Palembayan, Matur dan IV Koto, meliputi 10 nagari. Pengembangan kawasan ini difokuskan pada sektor pertanian, perkebunan, peningkatan nilai tambah melalui pengembangan usaha mikro dan agro wisata dan wisata alam.

Gambar 1. Peta Kawasan Agribisnis Kabupaten Agam, 2025



Sumber; BAPPEDA Kabupaten Agam, 2025

Sektor pertanian merupakan pondasi utama perekonomian Kabupaten Agam. Sektor lainnya yang menjadi sektor basis adalah pariwisata dan usaha mikro. Guna mengoptimalkan potensi nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah telah membentuk kawasan perdesaan untuk budidaya perkebunan dan pengolahan komoditas pertanian melalui Keputusan Bupati Nomor 159 Tahun 2020 tentang Kawasan Agribisnis Pamako untuk 3 (tiga) kecamatan dengan 8 (delapan) nagari yaitu:

- a. Kecamatan Palembayan meliputi Nagari Baringin dan Sipinang;
- b. Kecamatan Matur, meliputi Nagari Panta Pauh, Matua Hilia, Tigo Balai, Lawang;

- c. Kecamatan IV Koto, meliputi Balingka dan Sungai Landia;

Untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Tahun 2026-2029 Kabupaten Agam mengusulkan 2 nagari tambahan yang berada di Kecamatan Matur yaitu Nagari Matua Mudiak dan Nagari Parik Panjang sehingga total nagari yang masuk dalam kawasan menjadi 10 nagari. Mempedomani Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, dasar pemilihan 3 kecamatan ini sebagai suatu Kawasan Agribisnis Pamako adalah :

- a. kesamaan topografi yaitu memiliki wilayah sangat terjal dengan kemiringan >45% seluas 21.922 ha (dua puluh satu koma sembilan dua dua hektar) atau sekitar 9,82% (sembilan koma delapan puluh dua persen);
- b. kesamaan jenis tanah yaitu Kambisol, Andosol dan Gleysol;
- c. potensi pertanian yaitu tanaman pangan yaitu padi, jagung, ubi, kacang-kacangan dan hortikultura yaitu cabe, bawang merah, jeruk, alpukat, sentra ternak dan perkebunan yaitu tebu dan kopi;
- d. kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan Geopark Sianok Maninjau dan kawasan agrowisata minat khusus;
- e. kawasan industri pengolahan berbahan baku pertanian;
- f. merupakan sasaran pembangunan kewilayahan yaitu Kawasan Geopark Sianok Maninjau, kawasan perikanan budidaya, kawasan pengembangan tebu, kopi dan pengolahannya.
- g. bagian kawasan untuk peningkatan konektivitas/aksesibilitas kabupaten dan wilayah lainnya, termasuk peningkatan ruas jalan propinsi.

Secara topografi, iklim, jenis tanah, potensi, bentang alam, Kawasan Agribisnis Pamako memiliki kesamaan. Nagari yang masuk dalam kawasan memiliki indeks desa membangun dengan status berkembang, maju dan mandiri.

Tabel 1. Indeks Desa di Kawasan Agribisnis Pamako

No	Nama Nagari	Status
1	Balingka	Mandiri
2	Sungai Landia	Mandiri
3	Matua Hilia	Mandiri
4	Lawang	Mandiri
5	Panta Pauah	Berkembang
6	Tigo balai	Mandiri
7	Matua Mudiak	Mandiri
8	Parik Panjang	Berkembang
9	Sipinang	Berkembang
10	Baringin	Berkembang

Sumber: DPMN Kabupaten Agam, 2025t54e

2.2 Sosial Budaya dan Kependudukan

Ketiga kecamatan di Kawasan Agribisnis Pamako Tahun 2026-2029, yaitu Kecamatan Palembayan, Matur dan IV Koto merupakan bagian sejarah bangsa dan representasi kultur sosial budaya masyarakat Minangkabau. Masyarakat di kawasan ini sejak zaman kolonial Belanda, sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani terutama untuk komoditi perkebunan yaitu tebu dan kopi. Penggilingan tebu di Lawang yang menggunakan tenaga kerbau dan kualitas tebunya sudah terkenal sejak lama. Ketiga kecamatan ini memiliki nilai sosial historis, sebagai kawasan bekas perang yang meninggalkan bekas sejarah serta budaya yang sangat menarik. Keberadaan gaya rumah-rumah berasitektur kolonial yang berkolaborasi dengan rumah gadang berasal dari sejarah lampau Kecamatan Matur yang dijadikan sebagai tempat wisata dan peristirahatan (*healing*) orang Belanda di zaman tersebut, diantaranya obyek wisata Geopark seperti Puncak Lawang dan Masjid Pincuran Gadang. Kekayaan sumber daya manusia Minangkabau yang telah modern sudah terkenal sejak zaman kolonial Belanda. Tradisi debat di balai adat serta lapau membiasakan masyarakat Minangkabau mengutarakan pikiran secara bebas. Kecintaan akan literasi dibuktikan dengan adanya majalah dengan nama PELITA MATOER dan MATOEA SAIJO, yang terbit sejak Tahun 1917. Matoea Saijo kemudian berkembang menjadi lembaga sosial, membantu peningkatan keterampilan wanita dan simpan pinjam guna peningkatan perekonomian masyarakat. Kawasan ini terkenal

dengan pahlawan, tokoh agama dan pedagang yang masyhur, seperti Haji Agus Salim, Rohana Kudus, Sutan Sjahrir, Emil Salim, Karni Ilyas, Adnan Kapau Gani, Abdoel Gani Radjo Mangkoeto, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi berasal dari kawasan ini.

Kawasan ini merupakan representasi sosial budaya Minangkabau, adat istiadat dan tradisi masih dipegang teguh, memiliki nilai historis sejarah melalui arsitektur rumah gadang berciri khas kolonial. Secara tradisional, masyarakat di kawasan ini hidup berkelompok dalam suatu ikatan genealogis dan teritorial yang otonom dengan pemerintahan kolektif berdasarkan hukum adat dalam sebuah sistem pemerintahan yang disebut Nagari. Pemerintah nagari yaitu ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari. Nagari dipimpin oleh wali nagari yang merupakan salah seorang anggota Kerapatan Adat Nagari yang dituakan dan dianggap pantas oleh Kerapatan Adat Nagari. Masyarakat Minangkabau taat kepada adat dan dalam penyelesaian konflik melibatkan Kerapatan Adat Nagari. Kehadiran secara berkelanjutan kelembagaan lokal Minangkabau merupakan keunggulan bagi pelaksanaan program ini.

Masyarakat pada kawasan memiliki kearifan lokal berupa perayaan Batagak Gala Datuak, Acara Adat Pernikahan, acara menyambut kelahiran dan kematian, ikan larangan, pendidikan di surau (masjid) dan lapau (kedai) dan tradisi gotong royong.

Ikatan silaturahmi sangat kental sehingga perantau terlibat secara aktif membangun nagari. Hubungan sosial dan komunal yang kuat antara kampung dan rantau merupakan modal Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan peran serta seluruh stakeholder dalam mendorong kemajuan dan kemandirian daerah. Kepercayaan dan kepedulian perantau terhadap Nagari dalam kemajuan dan kesejahteraan bersama, adalah modal dalam upaya menjadikan Nagari sebagai episentrum pembangunan.

Tabel 2. Data Partisipasi Perantau dalam Pembangunan Nagari

No	Kecamatan	Jumlah Dukungan
1	Matur	Rp. 1.382.953.004
2	IV Koto	Rp. 4.051.300.000
3	Palembayan	Rp. 2.338.678.000

Sumber : *Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Agam, 2025*

Jumlah Penduduk pada 3 (tiga) kecamatan Kawasan Agribisnis Pamako Tahun 2026-2029 yaitu Palembayan, Matur dan IV Koto berjumlah 77.246 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam jiwa) atau sekitar 15% dari keseluruhan penduduk Kabupaten Agam yang berjumlah 532.178 (lima ratus tiga puluh dua ribu serratus tujuh puluh delapan jiwa). Berdasarkan data rencana detail tata ruang Kawasan Matur, diketahui hampir 65% (enam puluh lima persen) penduduk memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dan 3% (tiga persen) pada sektor usaha mikro dan pariwisata. Melalui program Kawasan Agribisnis Pamako Tahun 2026-2029, diharapkan potensi sumber daya alam dan nilai tambah produk makin meningkat.

Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kawasan Agribisnis Pamako Tahun 2026-2029 Kabupaten Agam

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Palembayan	34.997	31.094
	Ampek Koto Palembayan	8.551	4.655
	Salareh Aia	3.391	4.382
	Salareh aia Barat	3.478	4.035
	Salareh aia Utara	3.610	3.734
	Baringin	3.600	2.936
	Sipinang	2.550	931
	Tigo Koto Silungkang	8.546	8.376
	Sungai Pua	1.271	2.045
2	Matur	9.369	19.407
	Matua Mudiak	1.627	6.015

	Parik Panjang	625	578
	Panta Pauh	1.148	2.030
	Matua Hilia	1.600	3.440
	Tigo Balai	2.700	3.672
	Lawang	1.669	3.672
3	IV Koto	7.535	26.745
	Balingka	2.905	7.308
	Guguak Tabek Sarajo	77	4.237
	Koto Gadang	715	2.609
	Koto Panjang	1.151	3.074
	Koto Tuo	654	4.246
	Sianok Anam Suku	488	2.843
	Sungai Landia	1.513	2.428

Sumber: RDTR Kawasan Perkotaan Palembang, Matua, IV Koto, 2024

2.3 Ekonomi

Sektor pertanian masih menjadi sektor dominan yang memberi kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Agam, namun sumber daya tersebut belum optimal dimanfaatkan guna mendukung pertumbuhan dan pembangunan daerah. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang 28,20% (dua puluh delapan koma dua puluh persen) Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Agam.

Tabel 4. Nilai, Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Agam ADHB (miliar)

Kelompok Lapangan Usaha	2022	2023		
	Nilai	Nilai	Rasio	Pertumbuhan
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.867,41	7.378,22	28,20%	7,44%
B. Pertambangan dan Penggalian	838,06	949,64	3,63%	13,31%
C. Industri Pengolahan	2.389,78	2.677,68	10,23%	12,05%
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,47	5,89	0,02%	7,65%
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,33	11,33	0,04%	0,00%
F. Konstruksi	2.203,27	2.439,28	9,32%	10,71%
G. Perdagangan Besar dan	4.721,62	5.146,10	19,67%	8,99%

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor				
H. Transportasi dan Pergudangan	1.538,78	1.745,73	6,67%	13,45%
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	208,25	237,45	0,91%	14,02%
J. Informasi dan Komunikasi	1.451,78	1.581,40	6,04%	8,93%
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	301,62	315,79	1,21%	4,70%
L. Real Estate	449,67	513,42	1,96%	14,18%
M. Jasa Perusahaan	8,21	9,38	0,04%	14,24%
N. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.101,20	1.174,13	4,49%	6,62%
O. Jasa Pendidikan	1.314,74	1.405,57	5,37%	6,91%
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	287,62	349,30	1,34%	21,45%
R,S,T,U Jasa Lainnya	196,60	221,67	0,85%	12,75%
Produk Domestik Regional Bruto	23.924,34	26.162,66	100,00	9,36%

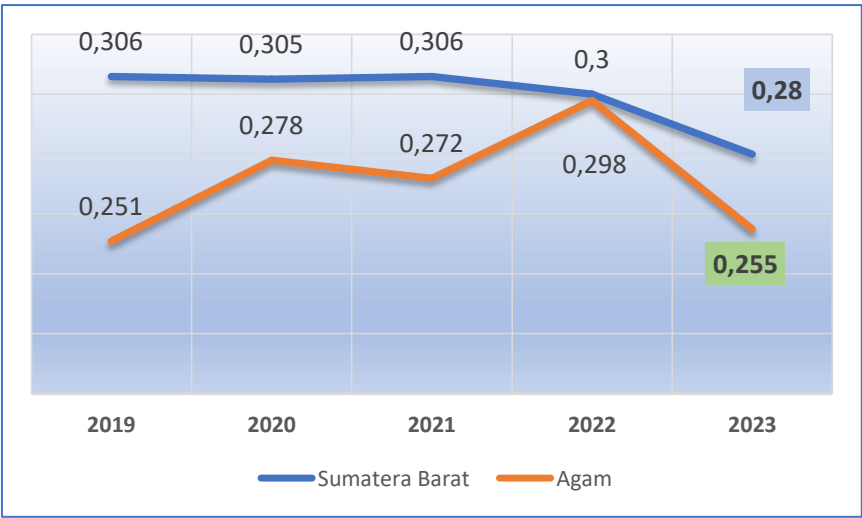
Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

Ketimpangan pendapatan adalah kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan pendapatan penting menjadi perhatian karena akan menyebabkan inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas serta jika ketimpangan ekstrim menunjukkan ketidakadilan. Koefisien Gini (*Gini Ratio*) menjadi salah satu indikator untuk melihat disparitas atau ketimpangan pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini menunjukkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh individu ataupun sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. *Gini Ratio* dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu : tingkat Ketimpangan Tinggi (*Gini Ratio* 0,50-0,70), tingkat Ketimpangan Sedang (*Gini Ratio* 0,35-0,50), dan tingkat Ketimpangan Rendah (*Gini Ratio* 0,20-0,35).

Pada tahun 2023 ketimpangan pendapatan masyarakat kabupaten Agam turun dibanding kondisi tahun sebelumnya. Hal ini tergambar dengan semakin turunnya angka gini rasio dari 0,298 ditahun 2022 menjadi 0,255 ditahun 2023. Angka 0,255 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat Agam berada pada tingkat ketimpangan rendah.

Sementara ditingkat provinsi, angka gini rasio juga mengalami penurunan dari 0,3 ditahun 2022 menjadi 0,28 ditahun 2023. Perkembangan Gini Rasio tahun 2019-2023 disajikan pada berikut:

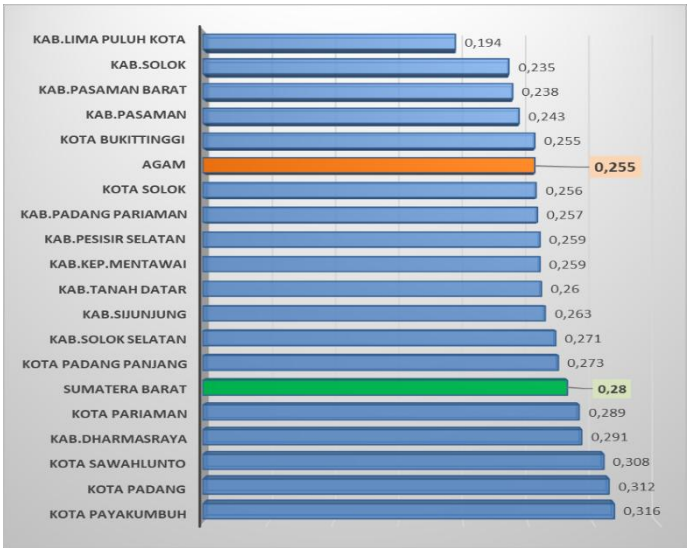
Grafik 1. Gini Rasio Kabupaten Agam Tahun 2019 s.d 2023



Sumber: BPS Sumatera Barat 2023

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota Sumatera Barat, angka gini rasio kabupaten Agam menempati posisi ke enam terendah. Sedangkan pada tingkat kabupaten, Agam menempati posisi ke lima terendah. Data Gini Ratio Kabupaten Agam dibanding kabupaten/kota dan provinsi disajikan dalam grafik berikut :

Grafik 2: Gini Rasio Kabupaten Kota Di Sumatera Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

2.4 Sarana prasarana

Kawasan Agribisnis Pamako Tahun 2026-2029 telah memiliki sarana prasarana yang memadai. Sarana pemerintah pemerintahan di Kecamatan Matur cukup lengkap mulai dari kantor kecamatan, kantor nagari/desa, sekolah mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas atau setara, serta puskesmas dan juga puskesmas pembantu. Kecamatan Matur memiliki 3 pasar yaitu Pasar Serikat Lawang Tigo Balai, Pasar Serikat Matur, Dan Pasar Akaik Ambun Pagi. Ketiga pasar ini memiliki akses yang sangat baik dari setiap desir di dalam Kecamatan Matur. Kecamatan Matur juga menjadi sentra industri rumahan produksi gula tebu dan kacang tanah. Di kecamatan matur juga terdapat beberapa tiang pemancar jaringan untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi masyarakat dan juga terdapat sebuah masjid raya yang menjadi pusat keagamaan.

Kecamatan Matur mempunyai jarak lebih kurang 81,9 Km ke Bandara Internasional Minang Kabau dan 107 Km ke Pelabuhan Teluk Bayur. Jarak dari antara ibu kota kecamatan matur yang berada di nagari Matua Hilia ke Kota Bukittinggi berjarak lebih kurang 18,5 km dapat ditempuh melalui jalan provinsi maupun jalan alternatif via Nagari Panta. Sementara akses antar nagari/desa sudah terkoneksi dengan baik dan dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.

Kecamatan IV Koto merupakan kecamatan yang berbatasan dengan Kecamatan Matur yang berjarak 9 Km ke Kota Bukittinggi yang dapat ditempuh dengan waktu lebih kurang setengah 23 menit, Ke Kabupaten Padang Pariaman berjarak 43,3 Km melalui jalan Provinsi Sicincin-Malalak dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam 10 menit. Moda transportasi yang digunakan oleh masyarakat berupa angkutan kota dan ojek serta kendaraan pribadi. Di Kecamatan IV koto memiliki sarana prasarana penunjang ekonomi dan sosial masyarakat berupa sekolah dasar dan setara sekolah dasar sebanyak 7 unit, sekolah menengah pertama dan setara sekolah menengah pertama sebanyak 5 unit, dan sekolah menengah atas dan setara menengah atas sebanyak 4 unit. Di kecamatan IV koto juga terdapat 1 bank umum pemerintah dan 1 koperasi simpan pinjam. Di kecamatan IV koto terdapat sarana penunjang kesehatan masyarakat berupa 1 unit puskesmas dan 1 unit apotek.

Kecamatan Palembayan merupakan kecamatan yang juga berbatasan dengan Kecamatan Matur yang berjarak 39,5 Km ke Kota Bukittinggi melalui jalan provinsi yang dapat ditempuh dalam waktu lebih kurang 1 jam 14 menit. Moda transportasi masyarakat pada umumnya menggunakan angkutan kota, bus, dan ojek serta kendaraan pribadi. Kecamatan Palembayan memiliki sistem jaringan jalan yang terhubung, memperlancar arus transportasi dan komunikasi. Nagari Baringin dan Sipinang memiliki jalan kabupaten dengan total panjang 42,620 kilometer, yang merupakan tulang punggung mobilitas warga sehari-hari. Selain itu, jalan provinsi sepanjang 7,897 kilometer memungkinkan konektivitas dengan wilayah lain di Sumatera Barat. Infrastruktur ini mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat integrasi sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Pemerintah setempat terus berupaya meningkatkan kualitas jalan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Di Kecamatan Palembayan terdapat sarana penunjang ekonomi dan sosial masyarakat meliputi 1 bank pengkreditan rakyat dan 1 pasar serikat, sekolah dasar dan setara sekolah dasar sebanyak 12 unit, sekolah menengah pertama dan setara menengah pertama sebanyak 10 unit, sekolah menengah atas dan setara menengah atas sebanyak 4 unit, sarana kesehatan berupa poliklinik sebanyak 2 unit, puskesmas sebanyak 2 unit, dan apotek sebanyak 3 unit.

BAB III

DELINEASI DAN SUSUNAN FUNGSI KAWASAN AGRIBISNIS PAMAKO

Sektor basis (pertanian, usaha mikro dan pariwisata) merupakan pondasi perekonomian utama Kabupaten Agam. Seluruh komponen sektor basis ini menjadi unggulan di Kawasan Agribisnis Pamako ini, dengan sektor pariwisata dan usaha mikro sebagai komplementer. Penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Agam disebabkan oleh peran lapangan usaha pertanian sebagai sektor basis perekonomian. Lapangan usaha tersebut sekaligus menjadi lapangan usaha dengan tingkat penyerapan tenaga kerja terbesar dengan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang positif pasca wabah pandemi Covid-19.

Berbagai produk unggulan lainnya seperti kerajinan tangan (anyam dan sulaman, bordir) yang dihasilkan oleh masyarakat di kawasan melengkapi ragam komoditi kawasan ini.

3.1 Delineasi Kawasan Agribisnis Pamako Tahun 2026-2029

Kawasan Agribisnis Pamako terletak di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Palembayan, Kecamatan Matua, dan Kecamatan IV Koto yang berada di kawasan pertanian dan perkebunan potensial di Kabupaten Agam. Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Agam tahun 2025-2029, salah satu strategi utama dalam pembangunan sektor pertanian adalah dengan melakukan pengembangan kawasan dan komoditi potensial serta peternakan berkelanjutan. Keberadaan Kawasan Agribisnis Pamako menjadi salah satu indikator utama dalam menunjang perkembangan pertanian hingga proses pemasaran untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat. Karakteristik geografis Kawasan Agribisnis Pamako yang terletak di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1000-1500 mdpl, yang sangat mendukung untuk hampir semua jenis tanaman Hortikultura.

Dalam perencanaan pembangunan Kawasan Agribisnis Pamako, wilayah yang tergabung dalam Kawasan Agribisnis Pamako ini yakni 10 nagari dari 3 kecamatan sebagai berikut :

Tabel 5. Nagari di Kawasan Agribisnis Pamako

NO	NAGARI	KECAMATAN
1.	Baringin	Palembayan
2.	Sipinang	
3.	Lawang	Matur
4.	Tigo balai	
5.	Panta Pauh	
6.	Parik Panjang	
7.	Matua Hilia	
8.	Matua Mudiak	
9.	Sungai Landia	IV Koto
10.	Balingka	

Pemilihan 10 nagari ini didasarkan pada kesamaan kondisi geografis dan sosial, sehingga melahirkan komoditi pertanian dan perkebunan, budaya masyarakat, dan tatanan kehidupan sosial ekonomi yang hampir sama. Selain itu, kawasan ini juga dilewati oleh jalur lintas menuju kabupaten dan kota terdekat, sehingga sangat mendukung untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan adanya pembangunan Kawasan Agribisnis Pamako, diharapkan nagari yang tergabung dalam kawasan dapat meningkatkan perekonomian setempat dan kemandirian masyarakat, sehingga mampu menjadi pilot project bagi daerah lain dalam merumuskan pembangunan kawasan serupa.

Delineasi kawasan perdesaan ditentukan berdasarkan keterkaitan komoditas unggulan, tema kawasan, dan masalah yang akan diselesaikan pada desa-desa yang bersepakat membentuk Kawasan Agribisnis Pamako.

- a. Keterkaitan komoditas unggulan Kawasan Agribisnis Pamako didasarkan pada potensi pertanian yang dapat diarahkan pada aktifitas agribisnis.

10 nagari yang tergabung di Kawasan Agribisnis Pamako memiliki basis pertanian yang sama, seperti komoditi tebu, kopi, kacang tanah, dan beberapa jenis tanaman hortikultura lainnya. Dengan pengembangan potensi tiap nagari, akan dapat menjelaskan masing-masing peran nagari di Kawasan Agribisnis Pamako seperti

pengembangan pertanian, produksi dan budidaya, dan pengolahan serta pemasaran produk hasil.

Delineasi kawasan berdasarkan keterkaitan komoditas unggulan akan menjadi pedoman bagi nagari dalam menentukan apakah nagari akan mengambil peran dalam pengembangan produk pertanian, budidaya bibit komoditi utama dan pendukung, sebagai sentra produksi dan pengolahan berkelanjutan, maupun sebagai pusat pemasaran dan pariwisata. Dalam proses yang telah berjalan, alur bisnis ini masih belum terintegrasi dengan baik sehingga setiap nagari yang berada dalam Kawasan Agribisnis Pamako belum menentukan peran masing-masing dan tidak ada pola atau kesepakatan dalam alur hulu ke hilir.

Berdasarkan delineasi kawasan, akan melahirkan pola bisnis yang didasarkan pada potensi komoditi unggulan dari hulu ke hilir yang terintegrasi, sehingga mampu melahirkan Kawasan Agribisnis Pamako yang mumpuni di Kabupaten Agam.

b. Penetapan tema adalah Kawasan Agribisnis Pamako.

Agribisnis berasal dari dua kata yaitu Agri (pertanian) dan Bisnis (usaha), sehingga pengertian sederhana agribisnis adalah kegiatan usaha dibidang dan sektor pertanian yang berorientasi pada profit atau keuntungan. Agribisnis merupakan sistem yang mencakup kegiatan seperti pengadaan sarana produksi pertanian, tataniaga produk usaha tani, hingga hasil olahan pertanian.

Kawasan Agribisnis Pamako perlu memperhatikan aspek berkelanjutan dan disesuaikan dengan RPJMD kabupaten Agam, sehingga mampu mewujudkan Visi Kabupaten Agam yaitu **"Agam Madani Yang Maju, Adil, dan Sejahtera"**. Pengembangan kawasan ini diharapkan mampu memperkuat sektor pertanian, UMKM, serta pariwisata khususnya di Kawasan Agribisnis Pamako dan umumnya di Kabupaten Agam serta mewujudkan Visi Kabupaten Agam didalam RPJMD 2025-2029.

- c. Delineasi kawasan juga mempertimbangkan aspek kesamaan masalah yang dihadapi nagari-nagari didalam Kawasan Agribisnis Pamako.

Faktor kesamaan kondisi geografis dan sosial budaya melahirkan masalah yang sama pula. Nagari-nagari di Kawasan Agribisnis Pamako belum memiliki kesadaran tentang pentingnya peran serta dalam mendukung pengembangan kawasan, sehingga masyarakat belum sadar bahwa potensi yang dimiliki di nagari mereka perlu diperharikan secara bersama. Hal ini menimbulkan masalah berupa pengembangan potensi unggulan kawasan yang lambat serta keterbatasan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mendukung pengembangan tersebut. Selain itu faktor egoisme masyarakat di tingkat kenagarian sering menjadi penghambat dalam upaya mewujudkan pengembangan Kawasan Agribisnis Pamako. Hal ini didasarkan pada rasa superioritas masyarakat nagari tertentu, sehingga menghambat kerjasama antar nagari untuk pembangunan dan pengembangan yang bersifat kewilayahan dan Kawasan Agribisnis Pamako.

Dari sisi sarana prasarana pendukung di Kawasan Agribisnis Pamako juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Untuk mewujudkan Kawasan Agribisnis Pamako, perlu ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai serta dapat mendukung usaha ekonomi masyarakat mulai dari hulu hingga hilir.

3.2 Susunan Fugsi Kawasan Agribisnis Pamako

Kawasan Agribisnis Pamako memerlukan susunan fungsi mencakup penetapan lokasi dan fungsi pusat kawasan serta peran masing-masing nagari dalam mendukung kawasan. Untuk mendukung tema kawasan Agribisnis Pamako, nagari-nagari yang tergabung akan diarahkan untuk membentuk cluster sesuai dengan komoditi pertanian dan perkebunan unggulan masing-masing nagari. Selain pengembangan komoditi unggulan masing-masing, nagari juga diarahkan untuk menjadi penyangga nagari lainnya yang memiliki komoditi yang sama sehingga menciptakan cluster komoditi yang kuat dan berkelanjutan.

Untuk kelancaran koordinasi dan komunikasi dalam usaha pembangunan kawasan serta mempertimbangkan posisi serta potensi nagari yang tergabung didalam Kawasan Agribisnis Pamako, maka pusat Kawasan Agribisnis Pamako ditempatkan di Nagari Lawang Kecamatan Matua. Pusat kawasan ini memiliki fungsi penting sebagai pusat kegiatan pertanian serta pusat akses menuju ke seluruh nagari didalam kawasan dan pusat pemerintahan daerah. Pusat kawasan juga akan dipersiapkan sebagai pusat pengembangan fasilitas dan pemasaran produk dan komoditi unggulan kawasan, dan membuka peluang untuk peningkatan pariwisata Kawasan Agribisnis Pamako. Selain itu berdasarkan analisis pemetaan aset dan potensi nagari di Kawasan Agribisnis Pamako, nagari Lawang telah memenuhi syarat tersebut, serta telah menjadi pusat kawasan sehingga dapat ditunjuk sebagai pusat oelayanan terhadap daerah panyangga (*Hinterland*). Nagari lawang diarahkan untuk pengembangan fasilitas-fasilitas pendukung seperti pasar agrowisata, pusat informasi kawasan, dan pengembangan sektor pariwisata. Sementara nagari penyangga berfungsi sebagai pusat pengembangan komoditi unggulan yang dipetakan secara klaster per jenis komoditi.

BAB IV

KLASTER DAN SASARAN KLASTER

Klaster adalah metode pengelompokan data. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), klaster adalah beberapa benda atau hal yang berkelompok menjadi satu (gugus). Dalam konteks Kawasan Agribisnis Pamako, klaster sering digunakan untuk menyebutkan kawasan yang memiliki kesamaan baik itu kesamaan industri atau geografis. Perumusan komoditas unggulan/klaster dalam dokumen RPKP Pamako 2026-2029 ini dilakukan melalui proses pemetaan aset dan potensi di masing-masing desa dalam kawasan. Pemetaan aset dan potensi desa ini dilakukan untuk mengetahui potensi pengembangan komoditas unggulan, permasalahan yang dihadapi, serta tantangan pengembangan komoditas tersebut baik dalam skala desa maupun kawasan perdesaan. Hasil pemetaan klaster ini kemudian akan menjadi acuan dalam pengembangan kawasan perdesaan serta melibatkan semua stakeholder seperti Pemerintah Nagari, BUMNag Bersama Kawasan, pelaku ekonomi di tingkat nagari, OPD terkait, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pemetaan cluster ini terdiri atas 2 (dua) yaitu cluster utama dan cluster pendukung. Klaster utama adalah pengelompokan berdasarkan komoditi, mulai dari pembibitan, penanaman dan perawatan, panen, proses pengolahan, hingga pemasaran. Sedangkan cluster tambahan berfungsi sebagai pendukung seperti pusat layanan, jaringan, pengembangan kelembagaan dan infrastruktur fisik.

4.1. Komoditas Unggulan Klaster Dan Sasaran Klaster

Sektor pertanian dan perkebunan menjadi penopang perekonomian utama bagi masyarakat di Kawasan Agribisnis Pamako. Jumlah produksi komoditi perkebunan tebu, mencapai 59,78% dari total produksi dan perkebunan kakao sebesar 30,47%. Hal ini menggambarkan kawasan perdesaan prioritas nasional merupakan kebijakan strategis guna peningkatan perekonomian masyarakat.

Tabel 6. Produksi Tanaman Padi dan Perkebunan di Kecamatan Kawasan Agribisnis Pamako

No	Kecamatan	Padi	Jagung	Kopi	Tebu	Kakao
1	Palembayan	40432	5212,8	46,93	237,06	275,65
2	Matur	18631	286,4	405,62	1515,33	6,06
3	IV Koto	16065	42	21,2	80,24	9,97
	total	75128	5541,2	473,75	1832,63	291,68
	total keseluruhan	341353	117098,9	1684,12	3065,63	957,4
	(%)	22,01	4,73	28,13	59,78	30,47

Sumber: Data Sektoral BPS, 2024

Disamping itu kawasan memiliki produk unggulan utama yaitu tebu dan kopi serta produk pendukung sesuai dengan karakteristik masing-masing nagari.

Tabel 7. Data Produk Unggulan Kawasan Agribisnis Pamako

No	Nagari	Produk Unggulan
1	Lawang	Tebu, Gula Merah, Kacang Barandang, Gula Semut, Stroberi, Sapi, Burung Puyuh
2	Tigo Balai	Tebu, Kacang Tanah, Padi, Kolang kaling
3	Panta Pauh	Padi, Bawang Merah, Cabe, Kulit Manis, Kopi, Kakao, Pinang, Pisang
4	Parik Panjang	Padi, Bawang Merah, Cabe, Kulit Manis, Pinang, Kakao.
5	Balingka	Stroberi, Kolang Kaling, Kopi.
6	Sungai Landia	Kopi, Kulit Manis, Sapi
7	Matua Hilia	Padi, Kacang Tanah, Bawang Merah, Cabe.
8	Matua Mudiak	Padi, Kacang Tanah, Bawang Merah, Cabe.
9	Baringin	Padi, Tebu dan Kopi
10	Sipinang	Padi, Madu Galo-galo, Kolang Kaling.

Sumber: Data Nagari di Kawasan, 2025

Sektor pariwisata juga merupakan potensi yang tak kalah pentingnya dalam mendorong perekonomian masyarakat Kabupaten Agam khususnya pada Kawasan Agribisnis Pamako. Kawasan Agribisnis Pamako memiliki

peranan strategis dalam pengembangan potensi pertanian, perkebunan, agrowisata, wisata alam dan usaha mikro. Produk “saka Lawang”, tebu, kopi, keindahan alam kawasan sudah terkenal sejak zaman Belanda. Pengolahan saka secara tradisional menggunakan tenaga kerbau menjadi wisata yang menarik. Keindahan dan ragam wisata alam seperti geosite dan wisata sejarah merupakan keunggulan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebahagian besar Kawasan Agribisnis Pamako di Kabupaten Agam merupakan kawasan geopark nasional yaitu Sianok-Maninjau. Kawasan Geopark Ngarai Sianok Maninjau terdiri dari 16 kecamatan yang dimana terdiri dari 2 wilayah yaitu Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi. Beberapa kecamatan di Kawasan Geopark Ngarai Sianok Maninjau terletak pada Kawasan yang sangat strategis, dimana dilalui jalur Lintas Tengah Sumatera dan Jalur Lintas Barat Sumatera dan dilalui oleh Fider Road yang menghubungkan Lintas Barat, Lintas Tengah dan Lintas Timur Sumatera yang berimplikasi perlunya mendorong daya saing perekonomian, serta pentingnya memanfaatkan keuntungan geografis yang ada. Geosite yang ada pada kawasan ini sebahagian besar adalah geoheritage dan geodiversity.

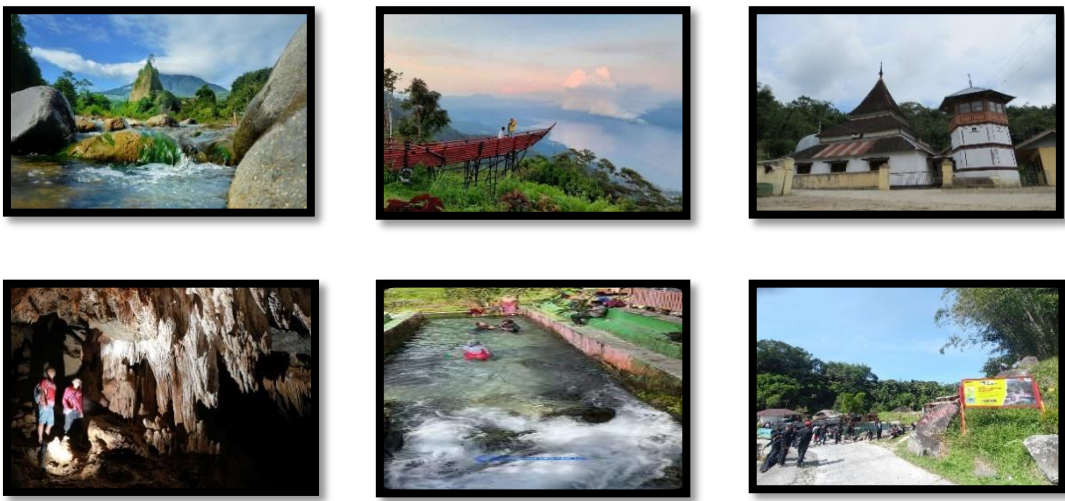
Tabel 8. Kawasan Agribisnis Pamako Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
(Geopark Sianok Maninjau)

Kota/Kabupaten	KECAMATAN	NAGARI	Luas (Ha)
Kabupaten Agam	1. Banuhampu	Cingakariang	392,47
		Kubang Putih	514,06
		Ladang Laweh	403,72
		Padang Lua	153,40
		Pakan Sinayan	531,47
		Sungai Tanang	257,05
		Taluak Ampek Suku	347,03
		TOTAL	2.599,19
	2. Baso	Bungo Koto Tuo	937,48
		Koto Tinggi	1.158,69
		Padang Tarok	2.117,01
		Simarasok	937,69
		Tabek Panjang	1.369,85
		TOTAL	6.520,72
	3. Canduang	Bukit Batabuah	1.186,08
		Canduang Koto Laweh	870,09
		Lasi	1.462,90
		TOTAL	3.519,06
	4. Ampek Angkek	Ampang Gadang	324,98
		Balai Gurah	712,22
		Batu Taba	206,86
		Biaro Gadang	732,42
		Lambah	427,41
		Panampung	423,90
		Pasia	105,49
		TOTAL	2.933,28
	5. IV Koto	Balingka	1.744,68
		Guguak Tabek Sarajo	128,36
		Koto Gadang	876,01
		Koto Panjang	964,24
		Koto Tuo	657,08
		Sianok Anam Suku	361,04
		Sungai Landia	1.692,93
		TOTAL	6.424,34
	6. Malalak	Malalak Barat	2.459,58
		Malalak Selatan	1.001,04
		Malalak Timur	677,04
		Malalak Utara	1.975,60
		TOTAL	6.113,25
	7. Kamang Magek	Kamang Hilir	1.973,05
		Kamang Mudiak	6.180,65

Kota/Kabupaten	KECAMATAN	NAGARI	Luas (Ha)
		Magek	564,03
		TOTAL	8.717,73
		Lawang	1.879,22
	8. Matur	Matua Hilla	1.306,90
		Matua Mudik	2.458,16
		Panta Pauh	1.139,22
		Parit Panjang	117,97
		Tigo Balai	2.369,88
		TOTAL	9.271,35
	9. Palembayan	Ampek Koto Palembayan	5.131,24
		Baringin	3.152,72
		Sipinang	1.386,38
		Sungai Puar	1.762,97
		Tigo Koto Silungkang	959,54
		TOTAL	12.392,85
	10. Palupuh	Koto Rantang	4.508,50
		Nan Tujuh	2.118,94
		Pasia Laweh	3.483,34
		TOTAL	10.110,78
	11. Sungai Pua	Batagak	617,79
		Batu Palano	184,63
		Sarik	259,13
		Sungai Pua	359,72
		TOTAL	1.421,27
	12. Tanjung Raya	Bayua	1.366,92
		Duo Koto	662,31
		Koto Gadang Anam Koto	731,16
		Koto Kaciak	1.239,61
		Koto Malintang	2.180,07
		Maninjau	331,55
		Paninjauan	630,36
		Sungai Batang	2.513,84
		Tanjung Sani	4.038,12
		TOTAL	13.693,94
	13. Tilatang Kamang	Gadut	2.131,27
		Kapau	451,09
		Koto Tengah	3.004,87
		TOTAL	5.587,23
	TOTAL LUAS		89.304,98

Sumber: Masterplan Geopark Sianok Maninjau, 2023

Gambar 2. Geosite Geopark di Kawasan Agribisnis Pamako, 2025



Sumber; Geopark Kabupaten Agam, 2025

Wisata alam dan wisata budaya di Kawasan Agribisnis Pamako menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung, berbagai bentuk even dan atraksi

tahunan yang dilakukan di Kawasan Agribisnis Pamako dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Bentuk Atraksi dan Event Nagari di Kawasan Agribisnis Pamako

N O	PROMOSI PARIWISATA	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN
A	Familiarization Trip		
1	Famtrip dari Keluarga Syekh Khatib Al Minangkabawi ke Objek Wisata Puncak Lawang, Nagari Koto Gadang dan Balai Gurah	8 Juli 2024	Nagari Lawang, Koto Gadang dan Balai Gurah
2	Famtrip dari media lokal dan nasional	6 Mei 2024	Objek Wisata Lawang Park
B	Event		
1	Festival Haji Agussalim	Oktober 2024	Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto
2	Festival seni dan budaya Nagari Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan	10 Agustus 2024	Nagari Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan
3	Event Sitanggang (Sidang Tangah Tradisi Malamang)	25 Agustus 2024	Jorong Sidang Tangah Kecamatan Matur
4	Event Matua Baralek Gadang	27 September 2024	Kecamatan Matua

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2025

Gambar 3. Potensi Unggulan Kawasan Agribisnis Pamako



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja ; 2025

Kawasan Agribisnis Pamako sudah memenuhi unsur 3A (atraksi/amenitas/aksesibilitas) dan memiliki potensi wisata sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Profil Pariwisata Kawasan Agribisnis Pamako

URAIAN	IV KOTO	PALEMBAYAN	MATUR
Data Kunjungan	80.429	3.172	154.169
Desa Wisata	7	1	6
Potensi :			
Unsur 3 A:			
Aksesibilitas	Aksesibilitas pada tiap kawasan sudah mencukupi kunjungan, akan tetapi minimal hanya bisa dilewati oleh bus ukuran mikro dan tidak bisa dilalui oleh bus ukuran besar, kurangnya transportasi umum menuju setiap Lokasi di tiga kecamatan tersebut.		
Amenitas	penunjang kegiatan wisata pada tiap' kecamatan sudah cukup memenuhi kebutuhan wisatawan akan tetapi masih kekurangan untuk mesin ATM serta kurang terjaganya kebersihan toilet		
Atraksi:	1. Balingka a. Petik Strawberry b. Taman Raya Balingka c. Pendakian Gunung Singgalang d. Pemandian Alam Mato Aia 2. Matur Hilia dan Matua Mudiak; a. Pincuran Gadang Balingka b. Sarasah 2 Tingkek c. Batu Baselo d. Goa Inyiak Janun 3. Sungai Landia, Camping Ground Tanah Sirah	4. Panta Pauh, Komoditi Jeruk 5. Baringin , Bukik Sakura 6. Sipinang, Masjid Kuno 7. Lawang a. Kilang Tebu b. Paralayang c. Lawang Park d. Puncak Lawang e. Tigo Baleh Nan Basa 8. Tigo Balai a. Wisata Benteng Andaleh b. Bukik Saribulan c. Wisata Air Senbad	

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2024

Kecamatan Palembayan, Matur dan IV Koto memiliki potensi UMKM yang besar dan menjadi sumber perekonomian masyarakat.

Nagari Lawang Kecamatan Matur merupakan penghasil tebu dan gula merah, masyarakat di Nagari Lawang mengolah tebu menjadi gula tebu. Usaha pengolahan gula tebu ini merupakan bentuk industri rumahan yang melibatkan anggota keluarga sendiri dan orang lain. Modal usaha pengolahan gula tebu berasal dari modal sendiri, pinjaman, dan patungan

UMKM di Kecamatan Matur dihadapkan pada berbagai persoalan, terutama segi pemasaran. Permasalahan ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah, melalui dana APBD Pemerintah memberikan pelatihan peningkatan kemampuan produksi dan pemasaran UMKM

Tabel 11. Jumlah Industri Kecil dan tenaga Kerja di Kawasan Agribisnis Pamako

Nama Kecamatan	Jumlah Industri Kecil dan Tenaga Kerja			
	Jumlah Industri		Jumlah Tenaga Kerja	
	2022	2023	2022	2023
Matur	743	751	2.977	3.010
IV Koto	900	911	3.578	3.603
Palembayan	290	298	1.126	1.138

Sumber : BPS Kabupaten Agam, 2024

Pengembangan dan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Agam mengambil tema “Kawasan Agribisnis Pamako”, dimana merupakan sistem yang mencakup kegiatan seperti pengadaan sarana produksi pertanian, tataniaga produk usaha tani, hingga hasil olahan pertanian.

Konsep ini menjadi pilihan utama dalam pembangunan Kawasan Agribisnis Pamako karena masing-masing nagari di dalam kawasan ini memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang mampu menjadi tumpuan perekonomian masyarakat. Dengan fokus pengembangan pada komoditi unggulan pertanian dan perkebunan meliputi perbaikan kualitas komoditi, peningkatan jumlah produksi komoditi, pengembangan produk turunan hingga pemasaran. Konsep agribisnis ini akan mampu mendorong pemanfaatan komoditi unggulan kawasan dari hulu hingga hilir, output yang diharapkan adalah Kawasan Agribisnis Pamako mampu menjadi pusat perekonomian masyarakat di tingkat daerah, dan mendorong nagari atau kawasan lainnya untuk mengembangkan sektor pertanian perkebunan mereka hingga mampu menjadi sektor penopang perekonomian lokal.

Dalam mendukung pengembangan komoditi unggulan pertanian ini, diharapkan adanya intervensi dari pemerintah pusat dan stakeholder terkait dalam penyediaan bibit dan pupuk berkualitas, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola dan petani di Kawasan Agribisnis Pamako.

Untuk menunjang usaha agribisnis di kawasan perdesaan, UMKM menjadi kunci penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. UMKM diharapkan membawa kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) daerah, serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

UMKM perlu digerakan di kawasan perdesaan untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, serta memberikan kontribusi dalam pembangunan kawasan. Untuk mendukung hal tersebut, diharapkan intervensi dari pemerintah pusat dalam pembangunan Pabrik Pengolahan Tebu di Kawasan Agribisnis Pamako.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sebagian besar Kawasan Agribisnis Pamako di Kabupaten Agam merupakan kawasan geopark nasional yaitu Sianok-Maninjau sehingga potensinya sangat besar dan perlu untuk diarahkan pengembangannya. Kawasan Agribisnis Pamako berada di jalur lintas penghubung antar provinsi dengan intensitas perjalanan yang cukup tinggi. Hal ini semakin memperkuat potensi pariwisata dan perlu perhatian lebih untuk pemetaan dan pengembangannya.

4.2 Klaster Pendukung.

Dalam pengembangan suatu kawasan dibutuhkan klaster pendukung untuk memperkuat klaster komoditas. Klaster pendukung bertujuan untuk menyediakan layanan pendukung yang terdiri dari :

- a. Infrastruktur Fisik, berupa jalan penghubung antar desa maupun jalan usaha tani untuk meningkatkan aksesibilitas pasar komoditas pertanian serta akses wisatawan yang melakukan kunjungan ke destinasi wisata.
- b. Energi, terutama energi listrik diperlukan untuk penunjang infrastruktur pariwisata, pertanian, serta kegiatan usaha pengolahan pangan di kawasan. Ketersediaan energi ini juga dapat dipenuhi dengan dukungan sarana pembangkit listrik dengan energi baru dan terbarukan (EBT)

- c. Pendidikan, terutama didorong melalui pendidikan latihan kerja dan pendidikan non formal serta informal guna peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan, dan pariwisata
- d. Kesehatan, fasilitas layanan kesehatan diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta penunjang kegiatan agrowisata di kawasan
- e. Transportasi, diperlukan terutama untuk pengangkutan wisatawan dari pusat kawasan menuju ke destinasi-destinasi wisata kawasan serta untuk meningkatkan aksesibilitas pasar bagi komoditas pertanian
- f. Pembangunan Pasar Wisata yang focus pada penjualan komoditi unggulan kawasan.
- g. Permodalan, dukungan permodalan terutama bagi UMKM yang memerlukan insentif modal bagi pengembangan usaha.

BAB V

MODEL SINERGITAS PEMBANGUNAN KAWASAN AGRIBISNIS PAMAKO

Sinergisme merupakan proses kolaborasi atau kerjasama dua entitas atau lebih yang berkomitmen, membentuk suatu sistem yang saling memengaruhi untuk mencapai tujuan bersama, dan memberikan perubahan yang lebih baik atau berbeda dari efek masing-masing. Untuk menjamin terjadinya sinergisme, harus disusun suatu sistem yang direpresentasikan dalam model sinergisme.

5.1. Analisis Klaster.

Analisis klaster dimaksudkan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis, kebutuhan, dan komponen Pembangunan Kawasan yang akan berperan dalam jaringan mata rantai sub sistem. Sub sistem klaster komoditas dari sarana produksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Klaster pendukung terdiri atas sub sistem infrastruktur jalan penghubung antar nagari, energi, pendidikan, kesehatan, transportasi, permodalan, dan lain-lain sesuai tema.

Analisis klaster dilakukan melalui FGD di tingkat Kawasan dengan tahap sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing komponen pada masing-masing subsistem klaster
- b. Mengidentifikasi isu-isu strategis (permasalahan) yang dihadapi dan kegiatan yang dibutuhkan pada masing-masing subsistem;
- c. Mengidentifikasi komponen yang akan melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan.

Analisis klaster dalam RPKP Pamako Tahun 2026-2029 menjelaskan system pembangunan dari masing-masing klaster berdasarkan komoditi di nagari. Selain itu untuk menentukan target capaian dalam 5 tahun.

Tabel 12. Analisis klaster Pembangunan Kawasan Agribisnis Pamako

No	Klaster berdasarkan komoditi	Lokasi	Sasaran	Penanggung Jawab
1.	Tebu	Lawang, Tigo Balai, dan Baringin.	Tersedianya pengembangan komoditi mulai dari hulu - hilir, pengolahan produk	Dinas Pertanian
2.	Kopi	Baringin,		

		Sungai Landia, Balingka.	hingga pemasaran.	
3.	Kacang Tanah	Lawang, Tigo Balai, Matua Hili, Matua Mudiak.		
4.	Padi	Panta pauh, Parik Panjang, Matua Hilia, Matua Mudiak		
5.	Buah-buahan	Panta Pauh, Balingka, Lawang.		
6.	Sayuran Hortikultura	Panta Pauh, Parik Panjang, Matua Hilia, Matua Mudiak		
7.	Peternakan dan hasil peternakan	Lawang, Sipinang, Sungai Landia		
8.	Pariwisata	Kawasan Pamako	Tersedianya masterplan pengembangan wisata serta sector pendukung lainnya.	
9.	UMKM dan Pasar Wisata	Lawang, Tigo Balai, Parik Panjang, Matua Hilia, Sungai Landia, Baringin	Tersedianya masterplan pengembangan UMKM dan ekonomi masyarakat serta sector pendukung lainnya	
10.	Sarana prasarana	Kawasan Pamako	Tersedianya fasilitas utama dan fasilitas pendukung kawasan perdesaan	

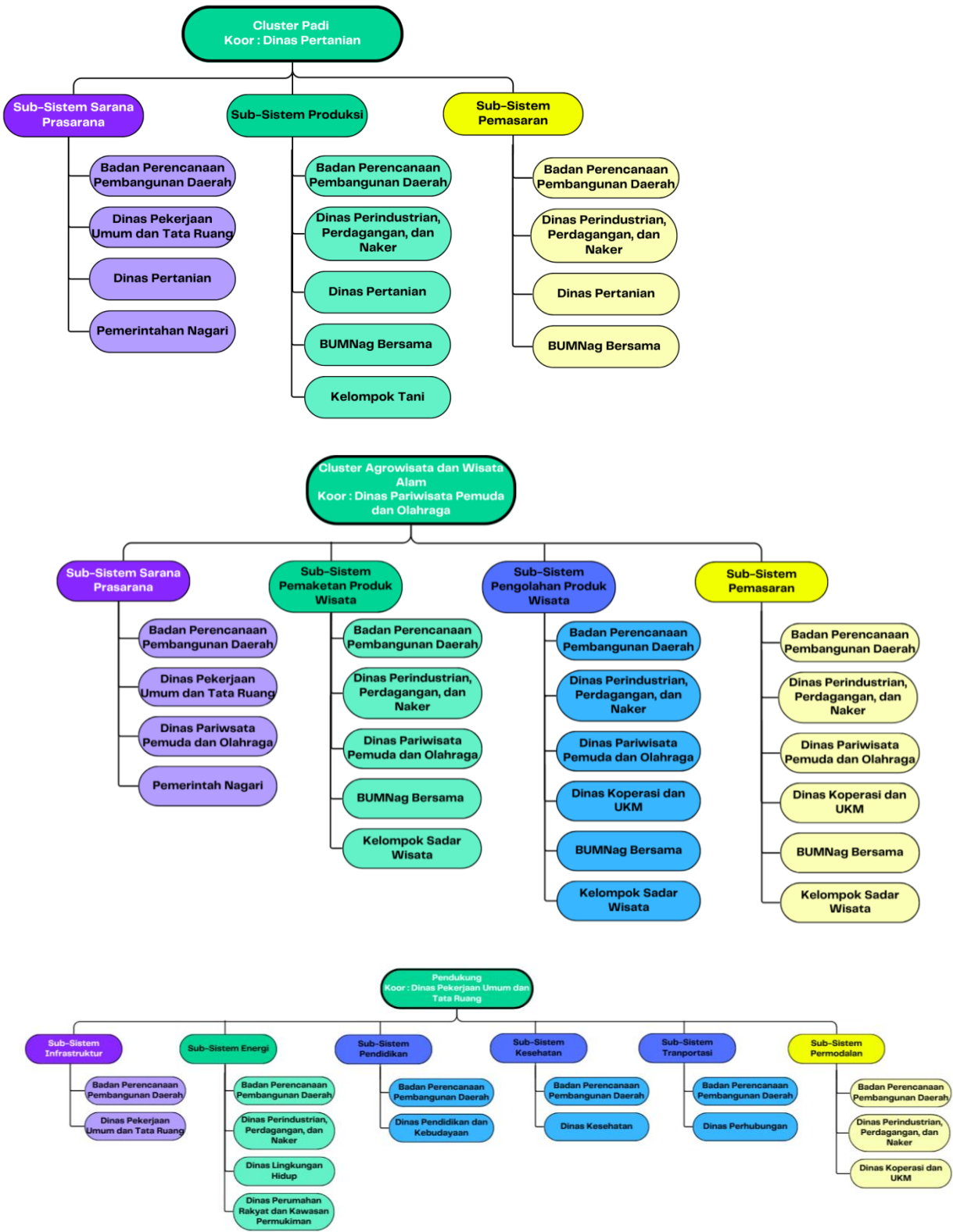
5.2. Struktur Kerja

Struktur kerja menjelaskan model sinergi dan peran masing-masing OPD Kabupaten Agam dalam program pembangunan Kawasan Agribisnis Pamako, sebagaimana tertuang didalam SK Bupati Agam Nomor 110 Tahun

2025 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Agribisnis Pamako Periode Tahun 2025-2029. Selain itu, kerangka system juga membahas tentang sinergi pemangku kepentingan lainnya didalam usaha pembangunan Kawasan Agribisnis Pamako.

Tabel 13. Struktur Kerja Pembangunan Kawasan Agribisnis Pamako





BAB VI

MATRIX PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembangunan Kawasan Perdesaan mensyaratkan pentingnya kerjasama dan sinergi program dan kegiatan antara kabupaten dan nagari-nagari yang ada dalam Kawasan Agribisnis Pamako. Berdasarkan potensi dan model sinergisme yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, terdapat kebutuhan untuk melakukan penataan dalam Pembangunan Kawasan Agribisnis Pamako. Dokumen ini disusun dan dirancang dengan memperhatikan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh kabupaten dan desa, dengan memperhatikan kebutuhan dan tantangan pembangunan yang ada. Sinergi dan kolaborasi yang terjalin antara kabupaten dan desa, maupun antar desa menjadi syarat penting dalam implementasi Kawasan Agribisnis Pamako.

6.1. Fase Pra-Inkubasi.

Pra Inkubasi merupakan tahap penataan menuju inkubasi yang bertujuan untuk melakukan internalisasi, penguatan kelembagaan dan penguatan konsep agribisnis. Tahap ini dibutuhkan karena nagari-nagari dalam kawasan belum memiliki pengetahuan dan arah pengembangan agribisnis, sehingga internalisasi RPKP Pamako Tahun 2026-2029 dan penguatan konsep dibutuhkan sehingga ada persamaan persepsi dan mempertemukan kepentingan berbagai pihak dalam Pembangunan Kawasan Agribisnis Pamako. Pada tahap ini, program yang dikembangkan antara lain:

1. sosialisasi dan internalisasi RPKP Pamako Tahun 2026-2029;
2. pembentukan dan penguatan kelembagaan;
3. penguatan kerjasama;
4. penyusunan *master plan* Kawasan Agribisnis Pamako; dan
5. peningkatan kualitas dan kapasitas produksi.

6.2. Fase Inkubasi.

Fase Inkubasi merupakan tahapan dimana kabupaten dan nagari secara bersama-sama melakukan penataan dalam menjalankan konsep agribisnis sesuai dengan kewenangan dan kapasitas yang dimiliki. Kabupaten akan banyak mengambil peran dalam memfasilitasi nagari, sedangkan nagari akan memperkuat kapasitas lokal menuju Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pada tahap ini, beberapa program yang akan dilaksanakan antara lain:

1. pendampingan legalitas usaha;
2. pelatihan dasar manajemen usaha;
3. pengembangan produk dan kemasan;
4. uji pasar dan strategi pemasaran;
5. erluasan pasar;
6. monitoring dan evaluasi kinerja usaha; dan
7. pendampingan untuk keberlanjutan usaha.

6.3. Fase Pemantapan.

Tahap pemantapan merupakan tahapan yang bertujuan untuk penguatan Pembangunan Kawasan Agribisnis Pamako. Pada tahun 2025-2026 ini, Kawasan Agribisnis Pamako sudah siap beroperasi dengan penekanan pada aspek pengembangan ekonomi, penguatan sosial-kultural dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, khususnya ekosistem hutan, air dan pertanian yang memang menjadi potensi penting di wilayah kawasan ini. Pada tahap ini, program yang akan dikembangkan antara lain:

1. launching Kawasan Agribisnis Pamako;
2. diversifikasi produk unggulan pendukung agrowisata;
3. peningkatan kapasitas;
4. promosi dan kerjasama;
5. penguatan investasi;
6. penguatan badan Usaha Milik Nagari Bersama dan Kelompok Sadar Wisata; dan
7. monitoring dan evaluasi.

6.4. Fase Pengembangan.

Fase pengembangan di Kawasan Agribisnis Pamako merupakan tahap penting dalam membangun ekosistem agribisnis yang berkelanjutan dan kompetitif. Program-program yang dilaksanakan umumnya berfokus pada peningkatan kapasitas produksi, penguatan kelembagaan, dan perluasan akses pasar. Pada tahap ini, beberapa program yang akan dikembangkan, antara lain:

1. **Penguatan Kapasitas Produksi**

- a. penerapan teknologi pertanian modern;
- b. pelatihan peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani; dan

c. diversifikasi produk agribisnis.

2. Pengembangan Infrastruktur dan Sarana Produksi

- a. pembangunan jalan usaha tani dan irigasi;
- b. penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan); dan
- c. fasilitasi gudang penyimpanan dan rumah kemas.

3. Penguatan Kelembagaan dan SDM

- a. pembentukan koperasi atau kelompok tani yang professional;
- b. pelatihan manajemen usaha dan keuangan; dan
- c. pendampingan intensif oleh mentor atau penyuluh.

4. Akses Pembiayaan dan Investasi

- a. kemitraan dengan lembaga keuangan mikro;
- b. skema pembiayaan berbasis hasil (*revenue-based financing*); dan
- c. promosi investasi agribisnis lokal.

5. Pengembangan Pasar dan Branding Produk

- a. sertifikasi produk (halal, organik, standar nasional Indonesia); dan
- b. promosi melalui pameran dan platform digital.

6.5. Kebutuhan pengembangan Kawasan Agribisnis Pamako

Tabel 14. Indikasi Program Dan Kegiatan
Rencana Pembangunan Kawasan Agribisnis Pamako Kabupaten Agam

N O	PROGRAM AKSI	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		KONDISI EKSISTING	TARGET TAHUN					ALOKASI BIAYA (Juta Rp)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	EXSISTING OUTCOME	EXSPECTING OUTCOME
							202 5	202 6	202 7	202 8	202 9					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DIMENSI EKONOMI															
1	Pengembangan Komoditas Unggulan (Tebu)	Pemurnian Varietas Tebu	Nagari Baringin Kec. Palembayan, Nagari Lawang Kec. Matur	2	varieta s	varietas tebu yang ditanam sudah banyak campuran	1	-	1	-	1	600,00	APBD	Dinas Pertanian	produksi rendah	peningkatan produksi
		Bantuan Bibit Tebu	Kecamatan Matur, Palembayan dan IV Koto	15000	stek	bibit yang digunakan saat ini masih bercampur	3.0 00	3.0 00	3.0 00	3.0 00	3.0 00	325,00	APBD	Dinas Pertanian	produksi rendah	peningkatan produksi
		Bantuan Bibit Tebu, Kopi, Stroberi dan Kacang	Kecamatan Matur, Palembayan dan IV Koto	100,000 ,-	batang	bibit yang digunakan saat ini masih bercampur	20. 000	20. 000	20. 000	20. 000	20. 000	300,00	APB Nagari	Nagari	produksi rendah	peningkatan produksi
2	Pengembangan Komoditas Pendukung (Strobery, Kopi, dan Kacang Tanah)	Pengadaan bantuan bibit unggul stoberi	Nagari Balingka	15	ha	luas lahan 10 Ha	3	3	3	3	3	600,00	APBD	Dinas Pertanian	komoditi tersebut diminati masyarakat	peningkatan pendapatan petani
			Nagari lawang Kec. Matur	5	Ha	luas lahan 5 Ha	1	1	1	1	1	200,00	APBD	Dinas Pertanian	komoditi tersebut diminati masyarakat	peningkatan pendapatan petani
		Pengadaan bantuan bibit unggul kopi	Nagari Sungai Landia Kec. IV Koto	5000	batang	Masyarakat baru merintis kembali perkebunan kopi	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0	100,00	APBD	Dinas Pertanian	komoditi tersebut diminati masyarakat	peningkatan pendapatan petani

			Nagari Baringin	15	ha	28	2	4	3	3	3	120,00	APBD	Dinas Pertanian	komoditi cukup potensial untuk dikembangkan di kecamatan kawasan PAMAko	peningkatan pendapatan petani
		Pengadaan bantuan bibit unggul kacang tanah	Nagari Lawang Balai, Matur Mudiak	20	ha	87	4	4	4	4	4	160,00	APBD	Dinas Pertanian	komoditi cukup potensial untuk dikembangkan di kecamatan kawasan PAMAko	peningkatan pendapatan petani
			IV Koto	5	ha	15	1	1,0	1,0	1,0	1,0	40,00	APBD	Dinas Pertanian	komoditi cukup potensial untuk dikembangkan di kecamatan kawasan PAMAko	peningkatan pendapatan petani
3	Pengembangan Komoditas Ternak (Sapi, Kambing, Ayam, dan Itik)	Sapi Potong	IV Koto	25	ekor	221	5	-	10	-	10	625,00	APBD	Dinas Pertanian	komoditi cukup potensial untuk dikembangkan di kecamatan kawasan PAMAko	Peningkatan Pendapatan Kelompok Peternak, / Peningkatan nilai tukar Petani, /meningkatkan kesejahteraan/ mengurangi tingkat pengangguran.
			Palembayan	30	ekor	3.256	-	10	10	-	10	750,00	APBD	Dinas Pertanian	komoditi cukup potensial untuk dikembangkan di kecamatan kawasan PAMAko	

			Matur	36	ekor	306	16	10	-	10	-	900,00	APBD	Dinas Pertanian	komoditi cukup potensial untuk dikembangkan di kecamatan kawasan PAMA KO
		Sapi Perah	IV Koto	10	ekor	Memiliki potensi untuk pengembangan sapi perah, namun terbatas dalam ketersediaan bibit	-	-	10	-	-	250,00	APBD	Dinas Pertanian	komoditi cukup potensial untuk dikembangkan di kecamatan kawasan PAMA KO
		Kerbau	IV Koto	35	ekor	522	-	15	10	-	10	875,00	APBD	Dinas Pertanian	komoditi cukup potensial untuk dikembangkan di kecamatan kawasan PAMA KO
			Palembayan	20	ekor	2.054	-	-	-	10	10	500,00	APBD	Dinas Pertanian	komoditi cukup potensial untuk dikembangkan di kecamatan kawasan PAMA KO
			Matur	30	ekor	947	-	-	20	-	10	750,00	APBD	Dinas Pertanian	komoditi cukup potensial untuk dikembangkan di kecamatan kawasan

															PAMAko
															komoditi cukup potensial untuk dikembangkan di kecamatan kawasan PAMAko
															komoditi cukup potensial untuk dikembangkan di kecamatan kawasan PAMAko
															komoditi cukup potensial untuk dikembangkan di kecamatan kawasan PAMAko
															komoditi cukup potensial untuk dikembangkan di kecamatan kawasan PAMAko
															komoditi cukup potensial untuk dikembangkan di kecamatan kawasan PAMAko
															komoditi cukup potensial untuk dikembangkan di kecamatan kawasan PAMAko

															kecamatan kawasan PAMAko	
			Matur	2.000	ekor	8.465	-	1.0 00	-	1.0 00	-	140,00	APBD	Dinas Pertanian	komoditi cukup potensial untuk dikembangk an di kecamatan kawasan PAMAko	
		Itik	IV Koto	3.000	ekor	5.023	-	-	1.0 00	-	2.0 00	210,00	APBD	Dinas Pertanian	komoditi cukup potensial untuk dikembangk an di kecamatan kawasan PAMAko	
			Palembayan	4.604	ekor	7.359	2.1 04	1.0 00	-	1.5 00	-	322,28	APBD	Dinas Pertanian	komoditi cukup potensial untuk dikembangk an di kecamatan kawasan PAMAko	
			Matur	3.000	ekor	708	-	1.0 00	1.0 00	-	1.0 00	210,00	APBD	Dinas Pertanian	komoditi cukup potensial untuk dikembangk an di kecamatan kawasan PAMAko	
		Bantuan Ternak Ayam, itik dan lele	Kecamatan Matur, Palembayan dan IV Koto	9	paket	Jumlah kelompok tani yang ada sebanyak 5	3	-	3	-	3	500,00	APB Nagari	NAGARI	komoditi tersebut diminati masyarakat	peningkatan pendapatan petani

		Pengadaan bantuan bibit Ternak	Sungai Landia	250	Ekor	Pernah mengadakan pada tahun 2024	-	250	-	-	-	45,00	Dana Desa	Nagari	komoditi tersebut diminati masyarakat	Meningtkan Ketahanan pangan dan Ekonomi Masyarakat
4	Pengembangan Objek Wisata (Alam, Buatan, Religi, Kuliner, Sejarah, dan Minat Khusus)	Pengembangan Wisata Agro	Kecamatan IV Koto	2	paket	icon wisata agro belum ada	-	1	-	1	-	200,00	APBD	Dinas Pertanian	wisata agro belum tertata	meningkatnya kunjungan wisatawan
		Pengembangan Atraksi Objek Wisata Alam	Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto	5	paket	Belum trendnya wisata jalan kaki (walking tour) yang dilaksanakan di kawasan-kawasan wisata Kabupaten Agam	1	1	1	1	1	500,00	Swasta	Komunitas walking tour Agam	Semakin digemarinya walking tour ini bagi wisatawan sehingga memberi dampak positif bagi pelaku-pelaku pariwisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan spend of money
		Pengembangan Atraksi Objek Wisata Buatan	Kecamatan Matur	5	paket	Masih minimnya promosi pariwisata dalam bentuk event tahunan yang dilaksanakan di Nagari	1	1	1	1	1	200,00	APBN ag	Pokdarwis	Adanya event pariwisata rutin tahunan di tingkat nagari sehingga mampu menjadi wadah penarik wisatawan untuk berkunjung ke Daerah	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan spend of money

		Pengembangan Atraksi Objek Wisata Minat Khusus	Nagari Lawang Kecamatan Matur	5	paket	Masih minimnya promosi pariwisata dalam bentuk event tahunan yang dilaksanakan di Nagari	1	1	1	1	1	500,00	APBD	Disparporan dan Nagari	Federation Aero Sport Indonesia Kabupaten Agam	Adanya event pariwisata rutin tahunan di tingkat nagari sehingga mampu menjadi wadah penarik wisatawan untuk berkunjung ke Daerah
		Rehab / Renovasi Objek Wisata Religi	Nagari matua hilia	1	bangunan	renovasi objek cagar budaya religi masjid pincuran (masjid pertama di kecamatan matua)	-	1	-	-	-	500,00	APBN	kementerian	tersedianya objek wisata religi yang representatif	meningkatnya kunjungan wisatawan
		Rehab / Renovasi Objek Wisata Kuliner	nagari lawang dan tigo balai	1	paket	renovasi dan penambahan ruang tersediri untuk kuliner di pasar lawang tigo balai	-	1	-	-	-	500,00	APBN	kementerian	tersedianya objek wisata kuliner yang representatif	meningkatnya kunjungan wisatawan
		Rehab / Renovasi Objek Wisata Sejarah	Nagari Matua Hilia	2	Cagar Budaya	Belum pernah dilakukan rehab/renovasi		2	2	2	2	200,00	APBD/ APBN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	tersedianya objek wisata sejarah yang representatif	meningkatnya kunjungan wisatawan
		Pemugaran Bangunan Bersejarah, seperti Rumah Tua Belanda dan Masjid Tua	Nagari Matua Hilia	2	Bangunan	Perlunya pemugaran bangunan bersejarah		2	2	2	2	200,00	APBD/ APBN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	tersedianya objek wisata sejarah yang representatif	meningkatnya kunjungan wisatawan

		Pemeliharaan objek wisata	Nagari Matua Mudiak	1	objek wisata	Objek wisata Ambun Tanai yang dikelola Disparpora butuh pemeliharaan setiap tahunnya	1	1	1	1	1	500,00	APBD	Disparpora	Terpeliharaan ya Sapta pesona di objek wisata Ambun Tanai	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan spend of money
	Pelibatan Pelaku Usaha Dalam Pengembangan Komoditas dan Objek Wisata	Kegiatan Pengembangan SDM di Bidang Bercocok Tanam (Tembakau)	Palembayan	4	SL	keterampilan kelompok tani masih tradisional	-	1	1	1	1	100,00	APDB	Distan	Terlaksana Sekolah Lapang PHT Tembakau	Peningkatan Pemahaman dan keterampilan petani tembakau dalam pengelolaan hama dan Penyakit Tembakau
		Kegiatan Pengembangan SDM di Bidang Bercocok Tanam (Pertanian) (SL GAP) hortikultura	Nagari Balingka. Matur Mudiak dan Matur Hilia	10	Keltan	keterampilan kelompok tani masih tradisional	2	2	2	2	2	250,00	APBD	Pertanian	komoditi tersebut diminati masyarakat	peningkatan pendapatan petani
		Kegiatan Pengembangan SDM di bidang pengolahan hasil pekarangan	Kecamatan Matur	5	paket	keterampilan kelompok wanita tani masih sederhana	1	1	1	1	1	125,00	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	pemanfaatan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga	meningkatnya gizi dan kesehatan keluarga
		Kegiatan Pengembangan SDM di Bidang Pengolahan Hasil Panen (Pertanian) (SL GHP hortikultur	Nagari Balingka. Matur Mudiak dan Matur Hilia	10	Keltan	keterampilan kelompok tani masih tradisional	2	2	2	2	2	250,00	APBD	Pertanian	komoditi tersebut diminati masyarakat	peningkatan pendapatan petani

		a)														
		Kegiatan Pengembangan SDM di Bidang Pengolahan Hasil Panen (Pertanian) (SL GHP Strobery)	Nagari Balingka. Matur Mudiak dan Matur Hilia	10	Keltan	keterampilan kelompok tani masih tradisional	2	2	2	2	2	250,00	APBD	Pertanian	komoditi tersebut diminati masyarakat	peningkatan pendapatan petani
		Kegiatan Pengembangan SDM di Bidang Pengemasan Produk Olahan (Pertanian)(SL UP3HP)	Nagari Balingka. Matur Mudiak dan Matur Hilia	10	Keltan	keterampilan kelompok tani masih tradisional	2	2	2	2	2	250,00	APBD	Pertanian	meningkatnya keterampilan kelompok tani	peningkatan nilai tambah produk dan pendapatan petani
		Pelatihan bagi petani/peternak	Kecamatan Matur, Palembayan dan IV Koto	150	orang	keterampilan kelompok tani masih tradisional	30	30	30	30	30	200,00	APBD	Pertanian	meningkatnya keterampilan kelompok tani	peningkatan nilai tambah produk dan pendapatan petani
		Kegiatan Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata dan e craft	Kecamatan Matur, Palembayan dan IV Koto	400	orang	keterampilan SDM pariwisata dan e craft masih belum maksimal	-	100	100	100	100	2.000,00	APBD/DAK	Disparpora	meningkatnya keterampilan	peningkatan pendapatan masyarakat
		Pelatihan wirausaha muda	Kecamatan Matur, Palembayan dan IV Koto	95	orang	belum pernah diadakan pelatihan utk wirausaha muda	15	20	20	20	20	480,00	APBD	Disparpora	meningkatnya keterampilan wirausaha muda	peningkatan pendapatan masyarakat

		Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	Kab Agam	0,5	%	sudah terlaksana dengan dana APBN DAK non-fisik dan dialihkan menjadi APBD murni	30	50	50	50	50	110,46	APBD	Diskopukm	menfasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi UMKn se Agam	terlatihnya pelaku UMKM sehingga meningkatkan SDM pelaku UMKM Agam dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan usaha mikro menjadi naik kelas
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab Agam	0,5	%	Sudah terlaksana dengan baik	50	50	50	50	50	206,26	APBD	Diskopukm	Pembinaan, pendampingan, pemberdayaan thdp pelaku UMKM	terbinanya pelaku usaha dalam pengembangan usaha, peningkatan omset dan aset, menjadi pelaku usaha yang berdaya saing yang mempunyai legalitas dalam segi kelembagaan UMKM
		Peningkatan akses petani terhadap alsintan pertanian	Kecamatan Matur, Palembang dan IV Koto	25	unit	pengolahan lahan masih manual	5	5	5	5	5	500,00	APBD	Pertanian	produktivitas lahan masih rendah	meningkatkan produksi pertanian
		Peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan tebu	kec matur	9	paket	pengolahan tebu masih bersifat manual	-	-	3	3	3	675,00	APBD/ APBN	perindag naker	meningkatnya keterampilan kelompok usaha	meningkatnya kualitas produk

		Peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan kopi	kecamatan palembayan	9	paket	pengolahan kopi masih bersifat manual	-	-	3	3	3	675,00	APBD	perindag naker	meningkatkan keterampilan kelompok usaha	meningkatkan kualitas produk
		fasilitasi perizinan usaha (kopi dan tebu)	kecamatan matur	2	kegiatan	izin usaha yang ada saat ini masih izin usaha perorangan	-	-	2	-	-	150,00	APBD	perindag naker	meningkatkan keterampilan kelompok usaha	meningkatkan kualitas produk
6	Branding, Sertifikasi (Standarisasi), Promosi, Pemasaran Produk, dan Pengembangan Jejaring	Pelatihan Branding dan Pemasaran Melalui e-Commerce	Kab agam	1	kegiatan	keterampilan pelaku usaha terkait branding belum optimal	-	1	-	-	-	150,00	APBD/ APBN	diskopukm	Fasilitasi Branding Produk IKM	meningkatkan nilai tambah produk
		Pelatihan Standarisasi produk / <i>quality control</i>	kab Agam	110	IKM	keterampilan pelaku usaha terkait standarisasi produk belum optimal	-	-	10	50	50	180,00	APBD/ APBN	Disperindag	Fasilitasi Kemasan/Packing Produk IKM	meningkatkan nilai tambah produk
		Pendampingan Pembuatan Paket / Event Wisata di Kawasan	Nagari Lawang Kecamatan Matur	5	paket	Masih minimnya kompetensi pelaku pariwisata dalam penyusunan paket wisata serta pengemasan event	1	1	1	1	1	500,00	APBD/ APBN	Pemerintah Nagari	Bertambahnya pengetahuan dan kompetensi pelaku pariwisata dalam penyusunan paket wisata dan pengemasan event	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan spend of money

		Fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dan merek kolektif pelaku ekonomi kreatif	Kawasan Pamako	30	produk	Masih minimnya pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual ataupun Merek komunal di Nagari sehingga besar peluang terjadinya plagiat	6	6	6	6	6	1.500,00	APBD	Disparpora	Pelaku ekonomi kreatif memiliki HKI sehingga ada perlindungan kekayaan intelektual terhadap inovasi produk yang mereka ciptakan, selain itu merek komunal bisa dijadikan branding bagi nagari bersangkutan	Meningkatnya nilai tambah produk ekonomi kreatif
		Promosi Produk (Expo PAMAKO)	Kawasan Pamako	4	kegiatan	produk lokal kurang dikenal masyarakat	-	1	1	1	1	300,00	APBD	Dinas Perindag Naker	produk lokal dikenal pasar nasional	meningkatnya nilai tambah produk
	DIMENSI SOSIAL BUDAYA															
1	Perubahan Perilaku dan Kreativitas Masyarakat	Pelatihan Hospitality bagi Masyarakat di Kawasan	Nagari Lawang Kecamatan Matur	5	paket	Belum optimalnya penerapan hospitality di kawasan	1	1	1	1	1	375,00	APBN ag	Pemerintah Nagari	Meningkatnya penerapan hospitality di kawasan wisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan spend of money
		Penguatan Budaya Gotong Royong untuk Penguatan Kapasitas Masyarakat	Kawasan Pamako	10	Nagari	Belum pernah pernah pencaangan BBGRM tk. Kecamatan dan Nagari	-	10	10	10	10	20,00	APBD	DPMN	Partisipasi dan swadaya masyarakat yang rendah	Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat

		Integrasi Data Migrasi Penduduk Keluar Kawasan (Budaya Rantau)	Kawasan Pamako	10	Nagari	eksisting validasi data yang belum update	-	10	10	10	10	10,00	APBD	DPMN	Data perantau / kelompok rantau dan kontribusinya ke Nagari belum terintegrasi di pusat data Nagari	Data perantau / kelompok rantau dan kontribusinya ke Nagari terintegrasi di pusat data Sistem Informasi Nagari
2	Pelibatan Pelaku Adat, Seni, dan Budaya	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Niniak Mamak selaku Kolaborator Nagari	Kawasan Pamako	10	KAN	Kolaborasi Pemangku Adat di Pemerintahan Nagari masih terbatas	-	10	10	10	10	80,00	APBD	DPMN	Peran pemangku adat dalam pengembangan kawasan pamako belum ada	Rumusan kesepakatan adat (buek arek bersama) antar pemangku adat dalam pengembangan kawasan pamako
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kawasan Pamako	10	Group	Belum pernah dilakukan peningkatan SDM	-	10	10	10	10	150,00	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya SDM pelaku kesenian di daerah Pamako	meningkatnya kunjungan wisatawan
3	Program Mempertahankan Nilai Budaya di Nagari	Penyusunan Kalender Sanggar Seni dan Budaya	Pamako	25	Sanggar	Belum tersedianya kalender sanggar seni dan budaya	25	25	25	25	25	400,00	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Pemerintahan Nagari	Dengan adanya kalender sanggar seni kegiatan-kegiatannya terarah dan terukur	meningkatnya kunjungan wisatawan
		Pemanfaatan Produk Budaya Masyarakat	Pamako	25	Sanggar	Sanggar ini ditampilkan untuk kegiatan adat dan acara resmi lainnya	25	25	25	25	25	200,00	APBD/APBNag	PemerintahNagari	adanya kegiatan seni disanggar dapat meningkatkan daya tarik kawasan	meningkatnya kunjungan wisatawan

		Sosialisasi terkait produk unggulan PAMA KO	Pamako	100	Orang	Belum adanya kegiatan sosialisasi	100	100	100	100	100	100,00	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	dikenalnya produk unggulan kawasan oleh masyarakat	meningkatnya ekonomi pelaku usaha
		FGD Budaya, Informasi, dan Pengetahuan	Pamako	100	Orang	Belum adanya kegiatan FGD	100	100	100	100	100	100,00	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang budaya setempat	memingkatkan kesadaran masyarakat akan kekayaan budaya setempat
		Pengarsipan Digital Catatan Sejarah, Tokoh, Adat, Budaya dan Seni	Pamako	4	Dokumen	Belum adanya kegiatan pengarsipan digital	4	4	4	4	4	200,00	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	tersedianya arsip digital tentang sejarah dan tokoh-tokoh setempat	masyarakat lebih mudah mengakses arsip budaya dan adat istiadat setempat
		Perencanaan Budaya, Governansi Budaya, dan Pendidikan Budaya	Pamako	4	Dokumen	Belum adanya kegiatan perencanaan, governansi dan pendidikan budaya	4	4	4	4	4	100,00	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	tertatanya kegiatan governancy dan pendidikan budaya	mencetuskan event budaya tahunan kawasan perdesaan
		Budaya, Kesetaraan, dan Inklusi Sosial	Kawasan Pamako	8	Nagari	telah terdapat 2 nagari yang menjadi pilot project desa inklusif (parik panjang dan sungai landia)	2	4	6	8	10	500,00	APBD/ APBNa g	Pemerintah Nagari	keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dan pertanggungjawaban kegiatan nagari	tercapainya inklusif dan akuntabilitas sosial di kawasan pamako
	DIMENSI LINGKUNGAN															
1	Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada Tata Ruang	Konservasi Sumber Air dan Daerah Resapan di Kawasan	Kec. Matur kec palembayan, kec. IV Koto	2	lokasi	masih minimnya konservasi sumber daya air dan	-	-	1	-	1	2.000,00	APBN	BKSDA	pemeliharaan daerah konservasi air	meningkatnya ketersediaan sumber daya air dan daerah resapan

	Kawasan Perdesaan	Hutan				daerah reaspan											
		Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kawasan Pamako	142.701.491	m2	ruang terbuka hijau di kawasan pamako telah ada di beberapa titik	-	-	-	-	-	-	APBD	DLH	ruang terbuka hijau di kawasan pamako telah ada	perawatan dan pelestarian ruang terbuka hijau di kawasan pamako	
		Regulasi dan Edukasi Terkait Pengelolaan Lingkungan dan Sampah / Limbah	Kab. Agam	2	dokumen	kabupaten Agam telah memiliki regulasi terkait sampah (perda sampah dan perbup sampah)	-	2	-	-	-	400,00	APBD	DLH	2 regulasi yang ada perlu pembaharuan	dokumen induk pengelolaan persampahan kab. Agam (perbup), dan jakstrada persampahan (perbup)	
2	Kapasitas Mitigasi Bencana, Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah / Limbah	Pengerukan Berkala dan Perbaikan Sistem Drainase di Sekitar Sungai untuk Mencegah Pendangkalan Sungai	Kecamatan Matur, Palembayan dan IV Koto	3	kecamatan	merupakan daerah rawan bencana dan termasuk aliran lahar gunung merapi	-	1	1	1	1	2.000,00	APBN	kementerian	mengindari luapan sungai saat curah hujan tinggi	terciptanya kawasan yang aman dari bencana	
		Pemasangan Pagar Pengaman di Area Rawan Longsor, Memperkuat Lereng Dengan Teknik Konstruksi Berkelanjutan	Kecamatan Matur, Palembayan dan IV Koto	3	kecamatan	merupakan daerah rawan bencana dan termasuk aliran lahar gunung merapi	-	1	1	1	1	2.000,00	APBN	kementerian	akses jalan utama penghubung antar nagari di kawasan merupakan area rawan banjir dan longsor	terciptanya kawasan yang aman dari bencana	

		(misalnya, pemasangan terasering), serta Menanam Vegetasi Pencegah Erosi														
		Pengembangan dan Pemasangan Sistem Peringatan Dini di Wilayah Rawan Longsor	Kecamatan Matur, Palembang dan IV Koto	6	unit	Belum terpenuhinya kebutuhan peringatan di titik rawan bencana	-	2	-	2	2	450,00	APBD	BPBD	rambu peringatan dini rawan longsor belum optimal	masyarakat mengetahui titik rawan longsor
		Penyediaan Tempat Pembuangan dan Pengelolaan Sampah / Limbah	Kecamatan Matur, Palembang dan IV Koto	20	unit	nagari di kawasan pamako belum maksimal dilayani pengelolaan sampah karena keterbatasan sapras	4	4	4	4	4	1.300,00	APBN/ APBN	DLH dan Nagari	Kontainer terpilah	pelayanan persampahan lebih maksimal dan tercipta Nagari Zero Waste
	DIMENSI PRASARANA															
1	Sarana Produksi, Pengolahan, Packaging, Penyimpanan, Pengeringan, Distribusi, dan Pemasaran	Pembangunan Sarana (Pabrik) Olahan Tebu	Kecamatan matur	1	unit	belum ada pabrik olahan tebu	-	-	1	-	-	500,00	APBN/ APBN	kementerian	pengolahan tebu masih manual	meningkatnya nilai tambah produk
		Pembangunan Sarana (Gudang) Olahan Kopi	kecamatan Palembang	1	unit	belum ada pabrik olahan kopi	-	-	1	-	-	500,00	APBN/ APBN	Kementerian	pengolahan kopi masih manual	meningkatnya nilai tambah produk
2	Konektivitas	Pembangunan jalan akses ke jorong-jorong	Kec. Matur	2600	m	Jalan tanah dan jalan beton kondisi rusak	200	600	600	600	600	1.950,00	APBD	PUTR	akses jalan masyarakat lebih lancar	meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat

		Kecamatan Matur														
		Pembangunan jalan akses ke jorong-jorong	Kec. IV Koto dan Kec. Palembayan	3300	m	Jalan tanah dan jalan beton kondisi rusak	300	600	800	800	800	2.475,00	APBD	PUTR	akses jalan masyarakat lebih lancar	meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat
		Peningkatan kapasitas jalan lingkar di Nagari Lawang	kecamatan Matur	1000	m	Jalan tanah dan jalan beton kondisi rusak	-	200	400	600	1000	600,00	APBNag	PemerintahNagari	akses jalan masyarakat lebih lancar	meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat
		Penetapan Tapal Batas antar Nagari dalam Kawasan	Kawasan Pamako	10	Nagari	Banyak segmen batas antar nagari yang belum disepakati	-	2	3	3	2	450,00	APBD	DPMN	Regulasi penetapan batas nagari dalam kawasan belum ada	Terumuskannya regulasi penetapan batas nagari dalam kawasan yang telah disepakati bersama
3	Aksesibilitas	Pembangunan Jalan Usaha Tani untuk Menghubungkan Lahan dan Objek Wisata di Nagari	Kecamatan Matur, Palembayan dan IV Koto	12	paket	jalan usaha tani perlu direhab	-	3	3	3	3	1.200,00	APBD	Dinas Pertanian	akses untuk pengangkutan saprodi dan hasil panen belum optimal	lancarnya akses pengangkutan ke dan dari lokasi lahan pertanian
		Pembangunan Bendungan Kecil untuk Mengalirkan Mata Air ke Lahan Pertanian dan Permukiman di Tigo Balai	- DI. Kampung Tingga Ateh - DI. Kampung Tingga Bawah - DI. Sungai Jariang - DI. Ruso - DI. Labuah - DI. Kampuang	3.500,00	Meter	Saluran Irigasi Rusak dan Bocor	-	875,00	875,00	875,00	875,00	5.000,00	APBD	DPUTR	produktivitas lahan masih rendah	meningkatnya produktivitas lahan

		Perbaikan Irigasi yang Rusak di Nagari Tigo Balai, Matua Hilia, Matua Mudiak	Kecamatan Matur	3	paket	pengairan belum optimal	-	-	1	1	1	300,00	APBD	Dinas Pertanian	produktivitas lahan masih rendah	meningkatnya produktivitas lahan
		Pelaksanaan Pipanisasi untuk Mengalirkan Air di Nagari Parik Panjang	Kecamatan Matur	1	paket	pengairan belum optimal	-	1	-	-	-	120,00	APBD	Dinas Pertanian	produktivitas lahan masih rendah	meningkatnya produktivitas lahan
4	Prasarana Umum	Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kecamatan Matur, Palembayan dan IV Koto	10	KSB	Belum optimalnya sosialisasi pada masyarakat di kawasan rawan bencana	-	3	3	3	1	350,00	APBD Nagari	Pemerintahan Nagari	kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengurangan risiko bencana	meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait kesiagaan bencana
		Penyediaan Fasilitas Kesehatan PUSTU di Nagari Balingka dan Nagari Tigo Balai	Nagari Balingka dan Tigo Balai	2	pustu	saat ini belum ada pustu di nagari Balingka dan Tigo Balai	-	2	-	-	-	1.500,00	APBN	Dinas Kesehatan	pembangunan pustu dimulai tahun 2026 untuk 2 nagari sasaran	meningkatnya akses layanan kesehatan
		Pemeliharaan Gedung Serbaguna untuk Aktivitas Masyarakat di Nagari Lawang	Nagari Lawang	1	unit	bangunan serbaguna di dalam kawasan pamako telah ada sejak tahun 2022 bertempat di nagari lawang	-	-	1	-	1	100,00	APBD	Dinas Parpora	bangunan serbaguna di dalam kawasan telah ada, dan dialokasikan perawatan oleh pemerintah daerah	sarana kegiatan dan kreatifitas masyarakat di dalam kawasan pamako

		Sarana Mandi / Cuci Masyarakat di Kawasan Perdesaan	Kec. Matur, Kec. IV Koto dan Kec. Palembayan	12,791	RT	60-80% masyarakat sudah memiliki akses sarana mandi	171	200	200	200	200	14.565,00	APBD	PUTR	meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana mandi/cuci	100% masyarakat telah memiliki akses sarana mandi/cuci
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kec. Matur, Kec. IV Koto dan Kec. Palembayan	12,791	RT	60-80% masyarakat sudah memiliki akses air bersih	125	150	150	150	150	3.625,00	APBD	PUTR	meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air bersih	100% masyarakat telah memiliki akses sumber air bersih
		Pembangunan Studio Pelatihan Adat, Budaya dan Seni di Masing-Masing Nagari	Pamako	10	Nagari	Belum ada Studio Pelatihan Adat, Budaya dan Seni di Masing-Masing Nagari	10	10	10	10	10	200,00	APBD/ APBN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Pemerintahan Nagari	Tersedianya fasilitas untuk kegiatan adat, budaya dan seni di masing-masing Nagari	meningkatnya minat masyarakat untuk ambil peran dalam melestarikan budaya setempat
5	Sarana Perdagangan	Pembangunan Pasar Wisata dan Agro atau Pusat Kegiatan Ekonomi Lokal di Matua Hilia	Kecamatan Matur, Palembayan dan IV Koto	1	unit	belum ada pasar wisata	-	-	-	-	1	7.000,00	APBD/ APBN	Dinas Perindag naker	meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana perdagangan	meningkatnya pendapatan masyarakat
		Pasar Kawasan Perdesaan	Aktifitas Pasar Lawang Tigo Balai	1	unit	belum ada pasar kawasan persediaan	1	1	1	1	1	1.000,00	APBD/ APBN	Dinas Perindag naker	meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana perdagangan	meningkatnya pendapatan masyarakat
7	Pelayanan Pendidikan Vokasi dan Ketrampilan	SMK	Nagari Lawang	1	unit	telah ada SMK Pariwisata	1	1	1	1	1	1.000,00	APBD Provinsi	Dinas Pendidikan Provinsi	meningkatkan minat peserta didik untuk bersekolah di SMK pariwisata	meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pariwisata

		Program Kampung Santri	Nagari Lawang	1	unit	Kampung Santri Jorong Gajah Mati	1	1	1	1	1	60,00	APB Nagari	Pemerintahan Nagari	Terciptanya generasi yang Qur'ani, berbudaya ABS SBK	melahirkan tokoh agama, budaya, dan kemasyarakata n deri generasi muda
		Program Kampung Inggris	Nagari Lawang dan Nagari Balingka	120	org	Untuk tahun 2024 program kampung inggris di Nagari Lawang Kec. Matur dan Nagari Balingka Kec. IV Koto telah terlaksana selama 4 (empat) semester dengan jumlah peserta yang lulus sebanyak 224 orang, dan telah diberikan sertifikat. Sesuai dengan arahan bahwasanya nagari yang melaksanak an program kampung inggris harus membentuk lembaga kursus, tapi sampai akhir tahun	60	60	60	60	60	200,00	APB Nagari	Pemerintahan Nagari	Setiap Nagari penyelenggar a kampung inggris harus memiliki izin lembaga kursus	meningkatnya kemampuan komunikasi internasional masyarakat

						2024 Nagari Balingka belum mengurus izin lembaga kursus										
	DIMENSI KELEMBAGAAN															
1	regulasi	Perbup / Juknis BUMNag dan BUMNag Bersama	Kabupaten Agam	1	Juknis	Belum ada juknis operasional dan tata kelola sesuai PP 11/2021	1	0	0	0	0	40,00	APBD	DPMN	Masih merujuk kepada PP 11/2021	Ada juknis turunan dari PP 11/2021
2	Penyusunan / Pembentukan / Pengaktifan	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Kecamatan Matur, Palembayan dan IV Koto	1	dokumen	data sudah tidak relevan	-	1	-	-	-	100,00	APBD	Dinas Pertanian	Data LP2B perlu direview ulang	data LP2B lebih akurat
		Pengintegrasian Data Gapoktan Penerima Pupuk Subsidi	Kecamatan Matur, Palembayan dan IV Koto	1	dokumen	data sudah tidak relevan	1	1	-	-	-	60,00	APBD	Dinas Pertanian	data belum tersedia	tersedia data yang sudah terintegrasi
		Pembentukan POKDARWIS yang terintegrasi di seluruh Kawasan	Nagari sungai landia	1	Kelompok	Nagari Sungai Landia	-	-	1	-	-	-	APBNag	Pemerintahan Nagari	Belum ada Pokdarwis yang terintegrasi	Terbentuknya Pokdarwis Nagari
		Pembentukan kelompok usaha untuk membuka lapangan usaha olahan hasil	Kecamatan Matur, Palembayan dan IV Koto	3	kelompok	kelompok usaha pengolahan hasil pertanian belum berkembang	-	1	1	1	-	120,00	APBD	Dinas Pertanian	produk olahan belum memiliki nilai pasar	meningkatnya nilai tambah produk dan pendapatan petani

		pertanian														
		Pembentukan dan Pengaktifan Kembali BUMNag di Nagari dan BUMNag Bersama Pamako sesuai kebutuhan suport sistem Kawasan	Kawasan Pamako	14	BUMNag dan BUMDesma	Masih ada nagari yang belum mendirikan BUMNag, yang mati suri, dan Vakum.	2	3	3	3	3	500,00	APBN/APBD	DPMN	Pembinaan, Pemberdayaan, dan Pendampingan masih kurang memadai	Meningkatnya Pembinaan, Pemberdayaan, dan Pendampingan Dinas terhadap Nagari dan BUMNag dan BUMDesma di Kawasan
3	Ketenagakerjaan	Kebijakan Daerah Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Lokal	Kab. Agam	1	dokumen	Agam belum memiliki kebijakan tentang penggunaan tenaga kerja lokal	0	0	0	1	0	200,00	APBD	Disperindag-Naker	tersedianya kebijakan tentang penggunaan tenaga kerja lokal	Penurunan tingkat pengangguran terbuka
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Agam	1	dokumen	Agam belum memiliki Rencana tenaga Kerja Mikro	1	0	0	0	0	60,00	APBD	Disperindag-Naker	tersedianya Rencana Tenaga Kerja Mikro	Penurunan tingkat pengangguran terbuka
4	Forum Pengembangan (Ekonomi) Daerah/Kawasan Perdesaan	Pengembangan Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian setempat untuk Meningkatkan Inovasi	Kawasan Pamako	5	dokumen	pemerintah daerah telah memfasilitasi kerjasama antar Nagari dengan Pihak ketiga (perguruan tinggi, usaha, dan penelitian)	1	1	1	1	1	(sesuai DPA tahunan)	APBD	DPMN, dll	kegiatan kerjasama telah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	peningkatan kerjasama diharapkan dapat mendorong kemajuan dan kemandirian nagari di dalam kawasan pamako

		Pengembangan Komoditas Unggulan														
		Pendampingan Lintas Sektor	Kawasan Pamako	5	dokumen	pendampingan kawasan pedesaan prioritas melibatkan semua sektor dalam pemerintahan daerah	1	1	1	1	1	(sesuai DPA tahunan)	APBD	DPMN, dll	pendampingan seluruh sektor belum maksimal untuk meningkatkan kemandirian kawasan pedesaan	dengan kerjasama dan kesinambungan antar sektor, kawasan pamako akan mampu menjadi sentra ekonomi dan kemasyarakatan
		Pendampingan Aktivasi BUMNag Bersama untuk Distribusi dan menjaga harga pupuk serta pestisida di Kawasan	Kawasan Pamako	5	kegiatan	belum pernah dilakukan pendampingan bersama	1	1	1	1	1	25,00	APBD	DPMN, Distan	harga pupuk dan pestisida masih bervariasi	terkendalinya harga pupuk dan pestisida sesuai aturan yang berlaku
5	Penguatan Kelembagaan	Pelatihan Entrepreneurship, Managerial dan Kepemimpinan, Tata Kelola Keuangan, dan Tata Kelola	Kawasan Pamako	84	Orang Pengurus	Masih rendahnya kemampuan pengurus dalam Manajemen Usaha	-	30	48	66	84	500,00	APBN/APBD	DPMN	Kemampuan pengurus mengelola BUMNag dan BUMDesma dalam Kawasan masih rendah	Kemampuan pengurus mengelola BUMNag dan BUMDesma dalam Kawasan meningkat dan mandiri

		Usaha bagi pengurus BUMNag dan BUMNag Bersama di dalam Kawasan														
		Bantuan Modal Kelembagaan BUMNag dan BUMDesma	Kawasan Pamako	14	BUMNag dan BUMDesma	Modal yang terbatas	-	5	8	11	14	15.200,00	APBN	DPMN	Modal usaha yang masih tergantung pada Dana Desa	Modal usaha dapat disuport dari bantuan Kementerian Terkait
		Pelatihan manajemen dan branding wisata yang ada di Kws	Kawasan Pamako	4	kegiatan	pelatihan tidak dilanjutkan dalam beberapa tahun terakhir	-	1	1	1	1	400,00	APBD/ APBN	Disparpora	meningkatkan kapasitas pelaku wisata terkait manajemen dan branding	modernisasi wisata

6.6 Target pasar

Pemasaran produk dilaksanakan melalui jejaring usaha mikro yang dimiliki petani dan pelaku usaha, yaitu di kedai/warung/toko, sesama pelaku usaha mikro antar daerah, badan usaha milik nagari, berbagai pameran dan pemasaran melalui aplikasi SIBAKO Rang Agam (Sistim Balanjo Komoditi dan Olahan Rang Agam), Inovasi ini bertujuan untuk memfasilitasi Pelaku usaha memasarkan produk unggulannya sehingga dapat bersaing dengan produk sejenis seperti produk Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, dan produk olahan lainnya di Kabupaten Agam.

Pemasaran produk sudah dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar lokal, pasar swalayan, pasar kabupaten/kota dalam provinsi seperti Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Padang dan sudah dipasarkan ke luar provinsi seperti Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Utara. Namun beberapa pelaku usaha masih terkendala dalam dalam pemasaran produk, sehingga perlu difasilitasi oleh Pemerintah Daerah agar produk tersebut dikenal luas.

6.7. Keterlibatan stakeholder

Secara teknis operasional, Kawasan Agribisnis Pamako di Kabupaten Agam sudah memiliki BUMNag Bersama yaitu PAMAko (Palembayan, Matur, IV Koto) yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Badan Kerjasama Antar Nagari PAMAko Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengangkatan pengurus BUMNag Bersama PAMAko.

Dengan dukungan Kemendes, masing-masing nagari sudah melakukan penyertaan modal ke BUMNag Bersama Pamako dimulai sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 15. Penyertaan Modal Nagari ke Badan Usaha Milik Nagari Bersama (BUMNagMa) PAMAko

NO	KECAMATAN	NAGARI	2020	2021	2022	2023	2024
1	MATUR	LAWANG				Rp 15.000.000,-	
2	MATUR	TIGO BALAI				Rp 15.000.000,-	
3	MATUR	PANTA PAUAH				Rp 15.000.000,-	
4	MATUR	MATUA				Rp	

		MUDIAK				15.000.000,-	
5	IV KOTO	SUNGAI LANDIA				Rp 15.000.000,-	
6	IV KOTO	BALINGKA				Rp 15.000.000,-	
7	PALEMBAYAN	BARINGIN				Rp 15.000.000,-	
8	PALEMBAYAN	SIPINANG				Rp 15.000.000,-	
9	KEMENDES				Rp 100.000.000,-		
TOTAL		220.000.000,-					

Sumber : pemerinkatan.kemendesa.go.id

Tabel 16. Penyertaan Modal Nagari ke BUMNag Bersama LKD (Lembaga Keuangan Desa)

NO	BUMDESMA	NAGARI	2020	2021	2022	2023 (Rp.)	2024	JUMLAH
1	MATUR MANDIRI MEMBANGUN	LAWANG				5.000.000,-		
2		TIGO BALAI				5.000.000,-		
3		PANTA PAUAH				5.000.000,-		
4		MATUA MUDIAK				5.000.000,-		
TOTAL								20.000.000,-
5	SARUMPUH TUJUAH NAGARI	SUNGAI LANDIA				5.000.000,-		
6		BALINGKA				5.000.000,-		
TOTAL								Rp 10.000.000,-
7	PALEMBAYAN SAIYO	BARINGIN				5.000.000,-		
8		SIPINANG				5.000.000,-		
TOTAL								Rp 10.000.000,-

Sumber : pemerinkatan.kemendesa.go.id

Tabel 17. Penyertaan Modal Nagari ke Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

NO	BUMDES	STATUS	NAGARI	2020	2021	2022	2023	2024
1	LAWANG SUGAR	Perintis	LAWANG		83.000.000		50.000.000	
2	TIGO BALAI SAKATO	Perintis	TIGO BALAI	31.000.000				200.000.000,00
3	PANTA PAUH SAKATO	Pemula	PANTA PAUAH		75.000.000		8.215.479	
4	MATUA MUDIAK SEPAKAT	Perintis	MATUA MUDIAK		150.000.000		15.000.000	
5	SUNGAI LANDIA SEJAHTERA	-	SUNGAI LANDIA					
6	BALINGKA BERJAYA	-	BALINGKA					
7	BARINGIN SAIYO	-	BARINGIN					
8	SIPINANG SAKATO	-	SIPINANG					

Sumber : pemerintahan.kemendesa.go.id

Disamping itu juga sudah ada lembaga pendukung Kawasan Agribisnis Pamako seperti kelompok tani, koperasi, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), desa wisata dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 18. Kelembagaan Pendukung Kawasan Agribisnis Pamako

No.	Kecamatan	Kelompok Tani	Koperasi	Pokdarwis	Desa Wisata	KAN
1	Palembayan	124	6	2	1	9
2	Matur	55	5	5	6	6
3	IV Koto	52	3	4	7	7
Total		231	14	11	14	22

Sumber : OPD terkait, 2024

Karakter kewirausahaan masyarakat Minangkabau sudah terkenal, sebagai pelanjut generasi pedagang. Bahwa dari 10 Nagari di Kawasan Agribisnis Pamako, masyarakatnya sudah mampu aktif berorganisasi, dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat dalam lembaga-lembaga di Nagari seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), Bundo Kanduang, Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK), Karang Taruna, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nagari, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Parik Paga dan Persana. Kearifan lokal adanya aktivitas “kadai” yang tidak hanya menjual produk namun juga menjadi sarana untuk berdiskusi dan transaksi antar pelaku usaha.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindag Naker, DPMPTSP, Badan Keuangan dan Aset dan BAPENDA sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam merealisasikan harapan pelaku usaha.

BAB VII

PENUTUP DAN LAMPIRAN

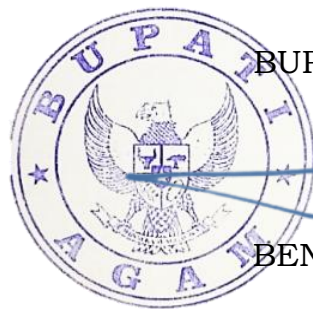
7.1 Kesimpulan

Kawasan perdesaan prioritas di Kabupaten Agam dimulai sejak Tahun 2020, melalui penetapan kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN) oleh Kementerian Desa. Kebijakan ini didukung oleh pembiayaan setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah dan provinsi dan Pemerintah Pusat. KPPN ini merupakan program strategis yang dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat karena bersifat tematik. Dukungan ini diharapkan dapat berkelanjutan melalui penetapan Kawasan Perdesaan prioritas oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Melalui kebijakan ini, pondasi perekonomian Kabupaten Agam yang berada pada sektor basis, akan memberikan dampak positif laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran serta menurunkan laju kemiskinan

Pengembangan Kawasan Agribisnis Pamako juga sejalan dengan misi asta cita ke lima melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Kawasan Agribisnis Pamako memiliki berbagai potensi sumber daya alam seperti komoditas pertanian, peternakan, perikanan dan wisata alam yang bisa dikembangkan dan diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi, melalui program fasilitasi usaha mikro dan kemitraan dengan koperasi dan swasta. Melalui hilirisasi masyarakat tidak hanya menjadi produsen, tapi juga menjadi pelaku dalam rantai nilai. Pengembangan infrastruktur di kawasan dalam mendukung hilirisasi dan pengembangan industri lokal menciptakan lapangan pekerjaan di kawasan pedesaan serta mendukung keberlanjutan ekonomi kawasan. Hal ini juga sejalan dengan Misi ke 3 Asta Cita melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri keratif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

7.2. Saran

Melalui RPKP, diharapkan pembangunan nagari dapat berjalan secara terpadu, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan. Dengan penetapan kawasan tersebut, maka Potensi Sektor basis akan termanfaatkan secara optimal sehingga memberikan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan di Kabupaten Agam.

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS